

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan bangsa dan negara, maka hampir seluruh negara di dunia ini menangani secara langsung masalah-masalah yang sangat penting, bahkan masalah pendidikan itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan bangsa dan negara. Maju mundurnya suatu bangsa sebagian besar ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan di negara itu (Abu Ahmadi dan Nur Ubbiyati, 1991:98).

Kemajuan suatu bangsa sangat erat hubungannya dengan tingkat pendidikan di negaranya, karena pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk menanggulangi kemiskinan, cara utamanya adalah dengan meningkatkan jumlah warga negara yang bersekolah dan terdidik dengan baik. Atau dengan kata lain pendidikan dipandang sebagai jalan menuju kemakmuran (Zahara Idris, 1981:15)

Dalam perkembangan pendidikan di Indonesia telah dilaksanakan sebelum abad XX, orang Indonesia hanya mengenal pendidikan tradisional. Pendidikan itu dalam bentuk pesantren-pesantren yang biasanya dilakukan di surau-surau. Sistem pendidikan ini serupa dengan sistem pendidikan dalam zaman Hindu. Pada kedua sistem ini murid datang kepada guru dan tinggal bersama guru menjadi keluarga guru di rumahnya, sawahnya atau ladangnya, mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Dalam zaman Hindu sistem pendidikan ini dinamakan "guru kula" (M. Said, 1981:80-70).

Kedatangan bangsa Barat di Indonesia memberikan suatu perubahan besar dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia terutama dalam bidang pendidikan, yakni kedatangan Belanda salah satu negara bagian Benua Eropa yang tidak begitu luas wilayahnya dan sebuah negara demokrasi kecil di Eropa Utara, yang hanya memainkan peranan kecil di kawasan luas bangsa-bangsa Eropa yang kuat, ternyata merupakan raksasa Kolonial (Frances Gouda 2007: 81).

Tahun 1816 pendidikan diusahakan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah kolonial. Sekolah yang dibuka dikhususkan kepada anak-anak berdarah Belanda sampai sekitar tahun 1850an yang umumnya tinggal di kampung ditengah-tengah kaum pribumi adalah sekolah Belanda untuk anak-anak Belanda miskin supaya mereka tetap bisa bersekolah seperti yang ada di Nederland. Sekolah Belanda atau *Europe Lagere Scool* (ELS) yang pertama kali didirikan di Batavia pada tahun 1817. Sekolah Belanda selanjutnya didirikan di seluruh wilayah Indonesia meliputi 20 di Jawa dan 15 di luar Jawa (S. Nasution, M. A. 2001: 91-92).

Para pemegang otoritas Belanda dalam abad ketujuhbelas dan delapan belas di Jawa telah menyerahkan hal pengajaran kepada gereja, swasta atau badan-badan kesejahteraan sosial. Pada abad ke 19, pengajaran bagi penduduk pribumi sudah ada, peraturan pemerintah pada tahun 1818 menetapkan bahwa orang pribumi diperbolehkan masuk sekolah Belanda. Dalam perjalanannya pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial mengalami perubahan pada tahun 1848 setelah Gubernur Jendral menerima biaya untuk mendirikan sekolah bagi kalangan orang Jawa, teristimewa bagi pendidikan pegawai bangsa pribumi. Sehingga tidak ada lagi pembatasan pada anak-anak pemeluk agama kristen saja, tetapi meliputi pada kebutuhan personil Gubernemen (H. Baudet & I. J. Brugsmans 1987:178-179)

Sekolah-sekolah Belanda awalnya hanya diperuntukkan bagi kalangan kaum ningrat dan priyayi, salah satunya sekolah Belanda yang terkenal adalah ELS (*Europese Lagere School*). ELS adalah Sekolah yang diperuntukkan untuk anak-anak keturunan Eropa, keturunan timur laut dan bumiputera. Tujuan utama didirikannya sekolah ELS adalah untuk mengembangkan dan memperkuat kesadaran nasional dikalangan keturunan Belanda. Sekolah ini merupakan kesinambungan pro kontra bagi pemerintah Belanda. Keinginan masyarakat pribumi untuk memasuki ELS menjadi salah satu kekhawatiran Belanda, sehingga pembagian usaha dilakukan untuk menghambat minat bangsa pribumi tersebut. Jumlah anak Indonesia dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, sehingga persyaratan wajib penguasaan bahasa Belanda menjadi alat yang sangat ampuh

untuk membatasi besarnya minat masyarakat pribumi untuk memasukkan anak-anak mereka ke ELS (S. Nasution, M. A. 2001 :92).

Pemerintah Hindia Belanda juga menerapkan prinsip konkordasi yang menyamakan standar sekolah rendah di negara Belanda maupun di Indonesia. Pungutan masuk sekolah yang mahal menyebabkan pribumi miskin tidak dapat mengenyam pendidikan. Pendidikan hanya dapat dinikmati oleh kaum ningrat, aristokrat, dan anak-anak wedono saja Berbanding sebaliknya kesempatan bersekolah bagi perempuan pribumi semakin kecil karena sekolah di Jawa dimaksudkan untuk mendidik pegawai pemerintahan. Konsekuensinya dua macam, yang pertama, hanya anak laki- laki yang diterima dan kedua, anak priyayi diberikan prioritas utama. Maka anak-anak perempuan mengalami berbagai rintangan dalam mengikuti pendidikan formal. Agama Islam, agama mayoritas penduduk Jawa pada masa itu masih ortodoks dan menentang pendidikan formal untuk gadis-gadis. Adat tradisional juga kurang menyetujui pendidikan untuk kaum wanita. Penduduk sendiri tidak melihat adanya manfaat gadis-gadis dididik dengan cara yang sama seperti anak pria. Gadis-gadis hanya memegang peranan penting dalam rumah tangga dan di sawah sehingga tidak perlu sekolah. Halangan sosial tersebut masih terlampau kuat untuk mengizinkan anak wanita menikmati kesempatan belajar yang sama seperti anak pria (S. Nasution, M. A. 2001:46-47).

Pendidikan bagi perempuan Jawa mulai menemui titik terang setelah terbitnya sebuah tajuk rencana De Taak pada tahun 1918 yang memberikan kesempatan perempuan Jawa untuk menikmati pendidikan seiring dengan adanya politik etis yang mulai dijalankan di Indonesia (Frances Gouda 2007:137). Setelah adanya tanam paksa (*Cultuur Stelsel* 1830), Belanda menjadi kaya raya, maka muncullah suatu usul dari Van Deventer tahun 1948, yang disebut ” Politik Etis ” atau politik balas jasa, yang isinya agar Belanda membalas budi kepada rakyat Indonesia dalam bentuk: Edukasi (pendidikan), Irigasi (pengairan), dan transmigrasi (Soedomo Hadi, 2005 : 117).

Politik Etis lahir sebagai sebuah tanggapan penuh penyesalan dan rasa bersalah, mengemukakan bahwa peran Belanda di Hindia, seyogyanya berbentuk

suatu *voogdijschap* (perwalian atau pembimbing) moral: kebijakan kolonial seharusnya terfokus pada pendidikan dan "*pengentasan*" rakyat Indonesia. Pada kenyataannya, dalam pidato Kenegaraan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Belanda pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina yang masih muda mengemukakan "misi moral" baru bagi para pegawai pemerintah kolonial Belanda di Hindia. Bukannya melihat tanah jajahan sebagai daerah kekuasaan dan sapi perahan yang menghasilkan keuntungan, Politik Etis mengisyaratkan sejumlah sumbangan dari pihak pemerintahan kolonial Belanda bagi pengembangan sekolah- sekolah dan pelayanan kesehatan, transportasi, dan pengembangan infrastruktur lainnya bagi penduduk pribumi (Frances Gouda 2007: 53).

Dengan adanya perluasan bidang pendidikan di Indonesia, rakyat Indonesia berhak mengenyam pendidikan yang setara dengan orang Eropa. Kepada anak-anak bangsawan Indonesia mulai diberikan kebebasan untuk masuk ke sekolah- sekolah dasar Eropa, sehingga mereka dapat melanjutkan masuk Perguruan Tinggi yang ada di negeri Belanda sedangkan untuk rakyat kecil atau golongan pribumi mulai diusahakan pendirian sekolah desa. Sekolah ELS didirikan pada tahun 1885 di Surakarta membuka kesempatan bagi anak-anak priyayi dan kaum Bangsawan sebagai sekolah dasar untuk melanjutkan sekolah ke perguruan Tinggi yang ada di Nedherland (S. Nasution, M. A. 2001:94-95).

Politik Etis juga membuka jalan bagi penguasa raja- raja di Jawa untuk membuka sekolah swasta supaya pendidikan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat tidak hanya yang berasal dari kaum bangsawan atau *Priyayi* tapi juga rakyat Jelata atau *Wong cilik*. Salah satunya adalah Pura Mangkunegaran yang membuka sekolah swasta di lingkungan Mangkunegaran. Mulai dibangun sekolah- sekolah untuk rakyat. Mengenai pendidikan yang ada di wilayah keraton Mangkunegaran sudah dimulai dengan berdirinya sekolah bagi laki-laki yaitu Siswo Mangkunegaran, yaitu sekolah pertama milik Mangkunegaran yang didirikan pada tahun 1912. Sekolah ini merupakan sekolah nomor satu, tetapi dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 1914, sekolah ini dijadikan HIS nomor IV di Surakarta (Amen Singgih, 1944: 1).

Pendirian sekolah-sekolah yang ada di wilayah Pura Mangkunegaran diusahakan oleh pihak istana sendiri, yaitu dimulai pada masa kepemimpinan Mangkunegoro VI. Namun dalam perkembangannya kemajuan tingkat pendidikan di Mangkunegaran sangat terlihat pada masa kepemimpinan Mangkunegoro VII. Pekerjaan lapangan pendidikan yang diselenggarakan oleh Mangkunegoro VII pada waktu silam biasa dikerjakan oleh badan-badan partikelir, lambat laun dijadikan pekerjaan resmi sehingga dengan cara yang teratur, dapat berhubungan erat dengan tata usaha Kerajaan (Amien Singgih, 1944:1).

Bermodalkan pengalamannya sendiri, dengan disertai itikad baik untuk mengabdikan pada rakyatnya dan melanjutkan serta memelihara hal-hal yang telah dicapai oleh pendahulu-pendahulunya, disertai dengan minat yang penuh untuk segala macam persoalan yang harus dihadapi, dengan tekun dan teliti mengikuti perkembangan tentang segala macam hal yang terjadi dan merasa terpanggil untuk selalu ingin berbuat sesuatu agar dapat meningkatkannya terutama dalam bidang pendidikan (Bernadinnah Hilmiyah 1985:41).

Mangkunegoro VII banyak mendirikan lembaga- lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diadakan di sekolah- sekolah secara teratur, sistematis, dan mempunyai jenjang serta waktu yang telah ditentukan, sedangkan pendidikan non formal adalah suatu bentuk pendidikan yang diselenggarakan secara tertib, terarah, dan berencana di luar sekolah (Zahara Idris, 1981:19).

Mangkunegoro VII tidak hanya mengusahakan sekolah bagi laki-laki, tetapi juga bagi kaum wanita. Karena kaum wanita masih terasa sulit untuk dapat mengenyam pendidikan yang setara dengan laki-laki. Bagi wanita, situasinya benar-benar berbeda. Seperti yang dilansir sebuah tajuk rencana terbitan Belanda *De Taak* pada tahun 1918 di mana dikemukakan pendidikan yang belum merata pada kaum wanita Jawa. Disebutkan bahwa pendidikan para "gadis Jawa" hanya memikirkan anak- anak perempuan dari kalangan bangsawan atau priyayi bukannya gadis-gadis miskin di desa atau di kampung, yang bekerja di sawah sejak subuh hingga senja dan hanya memiliki sedikit waktu untuk menikmati

indahny pendidikan (Frances Gouda 2007:137). Imbauan idealis untuk meningkatkan derajat bangsa Indonesia secara umum melalui peningkatan kedudukan perempuan pribumi, memberi inspirasi dalam pendirian serangkaian lembaga pendidikan swasta. Sekolah- sekolah ini dirancang khusus untuk mendidik para gadis Jawa dan mempersiapkan mereka menghadapi tugas sebagai ibu rumah tangga dan takdir sebagai ibu. Namun kesetaraan tingkat pendidikan yang bisa didapatkan oleh wanita Jawa terhambat pada feodalisme yang mengisyaratkan seperangkat kewajiban timbal-balik, dimana jasa pekerja ditukar dengan perlindungan. Dengan adanya masyarakat feodal Jawa, pendidikan bagi anak- anak perempuan yang berasal dari kaum priyayi atau bangsawan lebih mudah mengecap pendidikan daripada anak-anak perempuan dari kalangan bawah atau miskin (Frances Gouda 2007:138). Sehingga menimbulkan kesenjangan sosial antara golongan bangsawan/*priyayi* dengan golongan bawah/*wong cilik*.

Faktor penghambat lainnya adalah dimana tidak meratanya pendidikan bagi wanita Jawa ketika banyak sekolah mayoritas peserta didiknya anak laki-laki yang lebih besar jumlahnya daripada anak perempuan. Hal ini disebabkan karena keberatan orang tua Jawa jika anak perempuan mereka satu kelas dengan anak laki-laki. Sehingga semakin sulit bagi wanita Jawa untuk dapat menikmati pendidikan (Frances Gouda 2007:142 ).

Mangkunegoro VII sangat prihatin melihat kondisi sosial tersebut sehingga memiliki keinginan untuk mencerdaskan wanita Jawa yang tidak hanya berasal dari kaum bangsawan/ *Priyayi* tapi juga berasal dari golongan bawah/*wong cilik* sehingga tercapai pendidikan yang merata. Jiwa demokrat dan nasionalisme serta patriotisme masih tetap membara dalam dirinya walau telah diangkat menjadi raja. Jiwa kerakyatannya sangat terlihat karena Mangkunegoro VII telah mempelajari dan merasakan kehidupan rakyat jelata dalam masa pengembaraannya sehingga sepenuhnya dapat menghayati rasanya jadi "*wong cilik*" (Bernadinah Hilmiyah 1985:42). Selain itu Mangkunegoro VII juga mengenyam pendidikan Barat dan persahabatannya dengan teman- teman "*Etisnya*" dari Hindia Belanda yang memiliki misi yang sama untuk

meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan kaum pribumi terutama di Jawa. Salah satunya adalah Betsy van Deventer-Maas memiliki hubungan yang erat dengan Mangkunegoro VII ketika mereka berkenalan pada tahun 1912 di Solo. Untuk merayakan penobatan Mangkunegoro VII menjadi raja, Betsy mempersembahkan buku peringatan yang sangat indah sebagai kekaguman terhadap pesona tanah Jawa (Frances Gouda 2007:174).

Perhatian Mangkunegoro VII terhadap pendidikan bagi wanita Jawa terlihat dengan adanya Sisworini, yaitu sekolah yang diselenggarakan Mangkunegaran untuk kaum wanita (Amin Singgih, 1944:2). Pendirian sekolah ini didasarkan atas pertimbangan akan pentingnya kedudukan serta tanggung jawab wanita dalam rumah tangga selain itu juga dibekali ketrampilan-ketrampilan. Walaupun sekolah ini sudah ada sejak Mangkunegoro VI berkusa namun baru mengalami kemajuan setelah pemerintahan Mangkunegoro VII. Pada tahun 1923 Sisworini ditingkatkan menjadi *Huishoudkursus Sisworini* (kursus kerumahtanggan) dengan maksud mempersiapkan anak wanita menjadi "Ibu" dan pemegang rumah tangga yang baik dan kemudian ditingkatkan lagi menjadi *Huishoudschool* atau Sekolah Kepandaian Putri (Bernadinah Hilmiyah 1985:43).

Sisworini merupakan sekolah wanita pertama yang berada di lingkungan Mangkunegaran, sekolah ini didirikan untuk meningkatkan pendidikan bagi wanita khususnya wanita Jawa. Sisworini bertempat didalam halaman istana atau "Tjapoeri" masa penjajahan Jepang (Arsip B57 Rekso Pustoko). Sekolah Sisworini pada masa pemerintahan Belanda terletak di sebelah timur gerbang.

Wanita Jawa diajarkan berbagai ketrampilan dan mempersiapkan mereka menjadi pendamping suami kelak yang sesuai (Amien Singgih 1944:2). Keberadaan sekolah Sisworini sangat memberikan peranan yang penting bagi tingkat pengetahuan dan pendidikan bagi wanita Jawa, mereka diberikan hak yang sama seperti halnya laki-laki yaitu dalam mengenyam pendidikan. Padahal sebelumnya pendidikan bagi wanita pada waktu itu dianggap tidak penting, karena wanita Jawa hanya dinilai sebagai ibu rumah tangga saja yang memiliki peranan di rumah. Untuk itu Mangkunegoro VII, mengusahakan pendidikan bagi

wanita Jawa. Diharapkan melalui pendidikan yang didapat di Sisworini, wanita Jawa dapat pintar dan terampil seta mampu mempertahankan nilai-nilai budaya Jawa.

Berawal dari kondisi sosial masyarakat Jawa yang masih memandang sebelah mata pendidikan bagi wanita serta usaha-usaha yang dilakukan oleh Mangkunegoro VII untuk meningkatkan pendidikan khususnya bagi wanita Jawa di wilayah Mangkunegaran, penulis perlu menampilkan kehidupan wanita Jawa, bagaimana wanita Jawa dalam mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan yang saat itu masih sulit serta adanya Sisworini dalam meningkatkan pendidikan bagi wanita Jawa. Ini merupakan kajian yang sangat menarik untuk diketahui lebih jauh sehingga timbul keinginan penulis untuk mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "PERANAN SEKOLAH SISWORINI BAGI PENINGKATAN PENDIDIKAN WANITA JAWA (Studi Tentang Pendidikan Bagi Wanita Jawa Masa Mangkunegoro VII)".

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, permasalahan yang dapat dikemukakan sebagai berikut ;

- a. Bagaimana peranan Mangkunegoro VII dalam memajukan pendidikan di Mangkunegaran?
- b. Bagaimana sistem pendidikan di sekolah Sisworini?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan peranan Mangkunegoro VII dalam memajukan pendidikan di Mangkunegaran.
2. Untuk mendiskripsikan sistem pendidikan di sekolah Sisworini.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **a. Manfaat Teoritis**

1. Dapat menambah pengetahuan bagi pembaca guna mengetahui kondisi wanita Jawa pada saat itu.
2. Memberikan wawasan lebih luas kepada pembaca mengenai sistem pendidikan sekolah Sisworini.

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan akan ketertarikan yang lebih mendalam terhadap seluk beluk Mangkunegaran lebih luas lagi
3. Untuk dapat menambah koleksi penelitian ilmiah di Perpustakaan Program Pendidikan Sejarah Jurusan P.IPS Universitas Sebelas Maret Surakarta,

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pendidikan**

##### **a. Pengertian Pendidikan**

Pendidikan adalah salah satu alat yang paling strategis untuk mencapai tujuan bangsa dan Negara, terutama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ditinjau secara etimologi istilah pendidikan berasal dari kata latin “*Educere*” yang artinya membimbing keluar, kata yang bersinonim dengan itu adalah “*Educare*” yaitu memelihara’ membimbing serta memperkaya. Jadi mendidik berarti usaha membimbing, memelihara dan melengkapi seseorang agar dapat mandiri di masa yang akan datang (Samuel Sidjabat, 1987:19). Terdapat dua istilah pendidikan yaitu ilmu pendidikan (paedagogiek) dan pendidikan (paedagogie), istilah ini memiliki makna yang berbeda. Perbedaan tersebut yaitu :

- (1) Ilmu Pendidikan (paedagogiek )

Pendidikan yang lebih menitikberatkan kepada pemikiran perenungan tentang pendidikan. Pemikiran bagaimana sebaiknya sistem pendidikan, tujuan pendidikan, materi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, cara penilaian, cara penerimaan siswa, guru yang bagaimana, sehingga disini lebih banyak menitikberatkan teori.

(2) Pendidikan (paedagogie )

Hal ini lebih menitikberatkan dalam hal praktek, yaitu menyangkut kegiatan belajar mengajar. Keduanya ini tidak dapat dipisahkan secara jelas, keduanya harus dilaksanakan secara berdampingan, saling memperkuat guna meningkatkan mutu dan tujuan pendidikan (Soedomo Hadi, 2003:68).

Pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Paedagogie* yang terdiri dari kata “*PAIS*”, artinya anak, dan “*AGAIN*” diterjemahkan membimbing jadi paedagogie yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak. Secara definitif pendidikan diartikan oleh para tokoh pendidikan sebagai berikut:

(1) John Dewey

Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia.

(2) Langveld

Mendidik adalah mempengaruhi anak dalam usaha membimbingnya supaya menjadi dewasa. Usaha membimbing adalah usaha yang disadari dan dilaksanakan dengan sengaja antara orang dewasa dengan anak yang belum dewasa.

(3) Hoogeveld

Mendidik adalah membantu anak supaya ia cukup cakap menyelenggarakan tugas hidupnya atas tanggung jawabnya sendiri.

(4) Ki Hajar Dewantara

Mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselarasan dan kebahagiaan dalam hidup.

Pendidikan pada hakekatnya adalah suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus menerus (Soedomo Hadi, 2003:71-72).

Pandangan pendidikan terhadap sarannya menurut Driyarkaya adalah manusia bukanlah seekor makhluk biologis, melainkan seorang pribadi, seorang person, seorang subyek, artinya ia mengerti akan dirinya, sehingga mampu menempatkan dirinya, nasibnya ada ditangan sendiri (Driyarkaya, 1980 :82). Anak didik adalah manusia muda, manusia yang masih dalam taraf maksimal. Maka itu, mengapa pendidikan atau mendidik itu disebut suatu perbuatan fundamental, sebabnya karena mendidik itu adalah memanusiakan manusia muda, mendidik itu adalah proses *hominisasi* dan *humanisasi*, yaitu perbuatan yang menyebabkan manusia menjadi manusia( Driyarkaya, 1980 :87). Proses Humanisasi artinya penjadian manusia, yaitu manusia dari taraf potensial ketaraf maksimal, sedangkan proses humanisasi menunjukkan perkembangan kebudayaan yang lebih tinggi (Soedomo Hadi, 2003:72).

Berbicara mengenai pendidikan juga tidak dapat dilepaskan dari pengajaran dimana didalamnya terdapat kegiatan mengajar atau mendidik dan manusia menjadi subyek serta obyek dari pendidikan itu sendiri (Parsono, 1989:5). Pendidikan itu merupakan usaha manusia, tanpa pendidikan tidak akan maju dan berkembang, perkembangan merupakan kebutuhan manusia agar mereka dapat mencapai cita-citanya yaitu agar mereka dapat mencapai kebahagiaan (Parsono,1989:6)

Titik sentral atau pusat perhatian pendidikan adalah manusia, selain karena manusia perlu dan butuh pendidikan, hanya makhluk yang berpredikat manusia itulah yang dapat didik (Parsono, 1989:7), sehingga pendidikan jelas memiliki tujuan yang bersifat kompleks terutama bagi manusia itu sendiri. Ki

Hajar Dewantoro berpendapat, bahwa pendidikan itu bagi tiap bangsa berarti pemeliharaan guna mengembangkan benih turunan dari bangsa itu, agar dapat berkembang dengan sehat lahir batin. Untuk itu manusia harus dikembangkan jiwa raganya dengan mempergunakan segala alat pendidikan yang berdasar adat istiadatnya (Danasuparta, 1974:173).

Menurut prinsip *Life Long Education* yaitu pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan baru berhenti setelah orang itu meninggal dunia. Maka dari itu pendidikan tidak hanya diberikan secara formal saja di sekolah, tetapi disediakan lapangan pendidikan di luar sekolah yang merupakan pendidikan non formal (T.H.Sajid, 1982:5). Sedangkan Ahmad D. Marimba, menyatakan “bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama (Ahmad D. Marimba, 1989 : 19). Oleh karena itu, dari pengertian pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan tidak hanya menuntut kepandaian berpikir saja melainkan juga menuntut moral atau kepribadian yang tinggi. Dalam perkembangannya pendidikan selalu dapat dibedakan menjadi teori dan praktek. Teori pendidikan adalah pengetahuan tentang makna dan bagaimana seyogyanya pendidikan itu dilaksanakan, sedangkan praktek adalah pelaksanaan pendidikan secara konkret (Imam Barnadib, 1996:8). Menurut Pratte, teori pendidikan tidak dapat disusun seperti teori dalam ilmu pengetahuan alam, namun teori pendidikan disusun sebagai latar belakang yang hakiki dan rasional dari praktek pendidikan serta pada dasarnya bersifat direktif. Disusun sedemikian rupa untuk menemukan sejumlah penemuan dalam praktek (Imam Barnadib, 1996:9)

#### b. Jenis-Jenis Pendidikan

Sejak tahun 1816, ketika Jawa kembali lagi dikuasai Belanda, segera tampak bahwa pengaturan tentang persekolahan dan sekolah dasar lebih ditujukan pada pendidikan untuk orang Belanda saja. Peraturan pemerintah yang dikeluarkan pada tahun 1818, sama sekali tidak menyinggung tentang pendidikan untuk anak-anak Bumiputera. Baru dalam tahun 1848 ditetapkan untuk pertama kalinya adanya anggaran belanja untuk pendidikan orang-orang Indonesia, terutama anak-anak pegawai Indonesia. Baru dalam tahun 1863 diputuskan

melaksanakan pendidikan untuk semua anak- anak bumiputera, dan orang pertama yang menjadi inspektur urusan pendidikan bumiputera adalah J.A. Van Der Chijs (Redja Mudyaharjo 2001:259-260).

Jenis-Jenis pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Belanda antara lain:

(1) Sekolah Dasar Eropa (*Europeesche Logere School* atau ELS) pertama kali didirikan tahun 1817. Pada tahun 1820 berkembang menjadi tujuh buah, yaitu: dua di Batavia (*Weltevreden* dan *Molenvliet*), dan masing-masing di Cirebon, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Gresik (Redja Mudyaharjo, 2001:261). Tujuan ELS bukan lagi untuk mendidik orang agar taat beragama, melainkan menjadikan anak warga Negara yang baik. Kurikulum terdiri atas mata pelajaran membaca, menulis, berhitung, bahasa Belanda, Sejarah, ilmu bumi, dan mata pelajaran lain (Nasution, 1985:92). ELS dapat dipandang sebagai alat politik yang sepenuhnya dikuasai dan diawasi oleh pemerintah. Pengajaran bahasa Belanda memegang peranan penting dan meresapi semua pelajaran lainnya, penguasaan bahasa itu milik yang sangat berharga dan merupakan kunci untuk menjadi seorang pegawai (Nasution, 1985:94).

(2) Holand Chinese School (HCS).

Di Indonesia berdiri perkumpulan Cina, *Tung Hoa Hwee Kuan* pada tahun 1900 yang mula-mula mendirikan gedung pertemuan untuk menyebarkan kebiasaan dan moral Cina menurut ajaran *Kong Fu Tse*, perhatian mereka tertuju kepada pendidikan dengan mendirikan sekolah (Nasution, 1985:107). HCS didirikan pada tahun 1908 tujuannya adalah agar dengan bahasa Belanda dapat dikalahkan dorongan mempelajari bahasa dan kebudayaan Cina. Kurikulum HCS akan sama dengan ELS agar memberikan pendidikan Belanda yang murni kepada anak- anak Cina (Nasution, 1985:108).

(3) Hollands Inlandse School (HIS)

Alasan principal bagi pendirian HIS ialah keinginan yang kian menguat dikalangan orang Indonesia untuk memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan barat (Nasution, 1985:113). Banyak orang yang merasa

senang, karena ada pengharapan bagi bumiputera mencapai kepandaian yang bisa dijadikan alat untuk mencapai derajat penghidupan yang sama dengan penghidupan bangsa lain yang hidup di tanah air (Ki Hajar Dewantoro, 1977:103). HIS diresmikan pada tahun 1914 yang setara dengan Sekolah Kelas Satu, mata pelajaran terpenting adalah bahasa Belanda. Lulusan HIS relative banyak lulus dalam ujian pegawai rendah (Nasution, 1985:114-115).

(4) *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO)

Pada tahun 1903 dua kursus MULO dibuka di Bandung dan Yogyakarta. Kursus MULO dimaksud sebagai sekolah rendah dengan program yang diperluas dan bukan sebagai sekolah menengah. MULO semula merupakan lanjutan ELS dan memberikan pelajaran terminal. Kursus MULO juga dipandang sebagai cara untuk mencegah banyaknya *drop out* di HBS bagi murid intelektual kurang mampu (Nasution, 1985:122).

(5) Hogere Burger School (HBS).

*Gymnasium* (sekolah lanjutan) Willem II yang merupakan sekolah lanjutan untuk orang Eropa didirikan di Batavia pada tahun 1860. Pada tahun 1867 sekolah yang semula belajarnya tiga tahun di bagi menjadi dua bagian. Bagian A (*Afdelling*) dengan lama belajar lima tahun dan lulusannya dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Bagian (*Afdelling*) B dengan lama belajar tiga tahun dan lulusannya dapat melanjutkan ke Pendidikan Perwira, Pendidikan Pegawai Negeri, atau Akademi Perdagangan dan kerajinan tangan di Delft, negeri Belanda. *Gymnasium* ini kemudian diubah menjadi HBS dengan lama belajar lima tahun. HBS didirikan di Surabaya dan Semarang pada tahun 1875 dan 1877 (Redja Mudyaharjo, 2001:261-262).

(6) *Algemene Middelbare School* (AMS).

Dengan diresmikannya HIS dan MULO tidak dapat tidak timbul ide mendirikan sekolah menengah khusus bagi anak Indonesia yang berbeda, namun ekuivalen dengan HBS. Pemerintah menyadari tuntutan

ini dan membenarkannya. Nama yang diberikan kepada sekolah ini adalah *Algemene Middelbare School* atau disingkat menjadi AMS. AMS B pertama yang mengutamakan matematika dan fisika secara resmi dibuka di Jakarta pada tahun 1919, dan AMS AII klasik Barat di Bandung pada tahun 1920 sedangkan AMS AI, klasik Timur di Solo pada tahun 1926 sebagai pusat kebudayaan Jawa (Nasution, 1985:137-138).

(7) *Volksschool* (Sekolah Desa).

Pada tahun 1907 berdiri sekolah baru, yaitu sekolah desa yang akan menyebarkan cahaya di seluruh Nusantara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk (Nasution, 1985:77). Sekolah desa adalah perwujudan hasrat pemerintah untuk menyebarkan pendidikan seluas mungkin dengan biaya serendah mungkin dikalangan penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sekolah desa menjadi usaha pendidikan tersebar yang pernah dijalankan oleh Belanda untuk memberi kesempatan kepada rakyat banyak untuk belajar membaca, menulis dan berhitung (Nasution, 1985:87-88).

(8) *De Schoolen Der Eerst Klasse* (Sekolah Dasar Kelas Pertama)

Yaitu sekolah dasar negeri bumi putera untuk tokoh terkemuka bumiputera untuk tokoh terkemuka bumiputera, bangsawan, penduduk yang kaya raya. Jenis ini didirikan di Ibukota kresidenan, kabupaten, kewedanaan atau sederajat, dan kota yang menjadi pusat perdagangan atau kerajinan atau ditempat yang dipandang perlu. Sekolah ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, perdagangan, dan perusahaan. Berdasarkan Keputusan Raja, Sekolah Dasar Kelas I diubah menjadi *Hollandsche Inlansche School* (HIS), pada tahun 1915 (Redja Mudyaharjo, 2001:263).

(9) *De Schoolen Der Tweede Klasse* ( Sekolah Dasar Kelas Dua).

Yaitu sekolah dasar negeri bagi masyarakat bumiputera pada umumnya (Redja Mudyaharjo, 2001:263).

(10) *Kweekschool* (Sekolah Guru).

Sekolah guru pertama kali didirikan di Surakarta kemudian di Bukit tinggi pada tahun 1856. Kemudian didirikan di Tanah Batu (Tapanuli) pada tahun 1864. Kemudian menyusul Ambon, Probolingga, Banjarmasin, Makassar, Padang Sidempuan dan sebagainya.

c. Landasan dan Asas- Asas Pendidikan

a. Landasan Pendidikan

Landasan adalah sesuatu yang dipakai sebagai dasar untuk berpijak, dan dari sanalah segala aktivitas yang berdiri di atasnya (termasuk aktivitas pendidikan) akan dijiwai atau diwarnainya. Landasan pendidikan itu antara lain:

(1) Landasan Filosofis

Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu "*philosophia*" yang terdiri dari kata " *philein*" yang berarti cinta dan " *sophia*" yang berarti kebijaksanaan. Jadi *philosophia* adalah cinta akan kebijaksanaan (love of wisdom).

(2) Landasan Sosiologis

Secara etimologis sosiologi berasal dari kata "*sosios*": masyarakat atau sosial dan " *logos*" berarti ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu sosial atau ilmu kemasyarakatan. Secara Essensial sosiologi adalah ilmu yang mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan oleh masyarakat yaitu masyarakat tertentu mengenai susunannya, hakekatnya dan hubungan- hubungan serta kodrat yang menggerakkannya dimana menguasai kesadaran dan perkembangannya.

(3) Landasan Kebudayaan/ Kultural

a. Pengertian Kebudayaan

Kultural berasal dari bahasa asing yaitu *culture* yang berarti Kebudayaan. Pengertian kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah budaya budi rakyat Indonesia seluruhnya, artinya bawa kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari



kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan sendiri serta dapat mempertinggi derajat kemanusiaan Indonesia.

b. Kedudukan Kebudayaan di dalam pendidikan.

Disamping kebudayaan merupakan isi atau materi pendidikan, maka kebudayaan mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam pendidikan. Adapun kedudukan kebudayaan di dalam pendidikan tersebut sebagai dasar atau landasan pendidikan. Dikatakan Ki Hajar Dewantoro dalam buku pendidikan (1977:15) bahwa "Pendidikan Nasional" adalah pendidikan yang berlaskan garis hidup dari bangsanya dan ditujukan untuk keperluan prikehidupan yang dapat mengangkat derajat negaranya dan rakyat agar dapat bekerja bersama- sama dengan lain- lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia seluruh dunia.

(4) Landasan Psikologis

Psikologis berasal dari kata *psyche* yang berarti jiwa dan *logos* yang berarti ilmu. Jiwa menurut ahli psikologi *behaviorisme* adalah sesuatu yang menyebabkan adanya gerak. Menurut pengikut agama jiwa adalah sesuatu yang menimbulkan adanya kehidupan. Sedangkan para ahli filsafat jiwa adalah sesuatu yang menyebabkan manusia berpikir. Fungsi psikologi terhadap pendidikan merupakan study tentang tingkah laku dan hubungannya antar manusia.

(5) Landasan Ilmiah dan Teknologis.

Pendidikan merupakan interaksi antara subyek dengan kebudayaan, sehingga masyarakat dan kebudayaan merupakan pusat orientasi pendidikan. Kebudayaan adalah isi masyarakat yang akan dicapai oleh manusia dan yang menggambarkan tingkat kemajuan masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian dari kebudayaan yang berfungsi sebagai materi pendidikan. Kebudayaan yang merupakan hasil budi daya manusia, meliputi ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi ilmiah merupakan materi dari pendidikan sebab kemajuan kehidupan manusia juga sangat ditentukan oleh ilmu

pengetahuan dan teknologi (Abu Ahmadi dan Nur Ubbiyati, 1991,40-57).

b. Asas- Asas Pokok Pendidikan

(1) Asas Tut Wuri Handayani

Tut Wuri Handayani adalah semboyan dan perlambang Taman Siswa dan sebagai perlengkapan pendidikan dan pengajaran. Tut Wuri Handayani dipakai sebagai lambang pendidikan Nasional Indonesia. Dalam hubungannya dengan pendidikan modern, Tut Wuri Handayani merupakan langkah pelaksanaan pendidikan. Tut Wuri Handayani sangat cocok dengan aliran psikologi behaviorisme dan psikologi humanistic sebab fungsi guru disini tidak sebagai pengatur, penentu siswa melainkan berfungsi sebagai perangsang, pemotivasi siswa dan juga sebagai fasilitator sedangkan penentu keberhasilan pendidikan terletak pada siswa sendiri (Ngalim Purwanto,1988:59).

(2) Asas Belajar Sepanjang Hayat

Asas belajar sepanjang hayat sering disebut asas pendidikan seumur hidup yang bahasa asingnya” *Life Long Education*”. Pendidikan ini dimasyarakatkan sejak zaman Yunani kuno oleh Plato dalam bukunya yang berjudul” Republik” yang memberikan pendidikan untuk para pemimpin yang sadar dan mempraktekan asas-asas normatif dalam semua aspek kehidupan (Ngalim Purwanto,1988:61).

## 2. Gender

Istilah Gender mulai muncul baru-baru saja, dahulu istilah yang digunakan adalah emansipasi. Emansipasi berasal dari bahasa latin yaitu *emancipatio* yang berarti pembebasan dari tangan kekuasaan atau bisa diartikan sebagai proses di mana suatu kelompok sosial dalam masyarakat meningkatkan diri menuju suatu kedudukan yang lebih layak dan menjadi bagian yang integral dalam tata kehidupan masyarakat. Proses ini dapat menuju pada suatu asimilasi total. Gerakan emansipasi yang terkenal secara univerversal adalah menyangkut perjuangan rasial, kaum buruh tani, dan perjuangan kaum wanita. Emansipasi

yang hubungannya dengan gender adalah emansipasi kaum wanita, dimana gerakan emansipasi kaum wanita untuk memperoleh persamaan dan kebebasan seperti kaum pria. Gerakan emansipasi kaum wanita mulai muncul sejak abad 19 tokoh gerakan emansipasi wanita di Indonesia adalah R.A Kartini dan Dewi Sartika (Hassan Shadily, 1991: 919).

Secara konseptual, gender dibedakan dengan seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada kedua jenis kelamin tersebut. Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti: memiliki penis, memiliki jakala, dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti: rahim, saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan mempunyai alat untuk menyusui. Alat-alat tersebut melekat pada manusia laki-laki dan perempuan, dan bersifat permanen. Dengan kata lain, seks adalah ciri anatomi biologi yang membedakan laki-laki dengan perempuan yang bersifat kodrati. Jadi, secara visual perbedaan seks laki-laki dan perempuan dapat dilihat secara langsung (Mansour Fakih, 1999: 7-8).

Sedangkan konsep gender yaitu suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya: laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, sedangkan perempuan itu cantik, lemah lembut, emosional, dan keibuan (Mansour Fakih, 1999: 11-12). Gender adalah interpretasi mental dan kultur terhadap perbedaan jenis kelamin dan hubungan perempuan dan laki-laki. Gender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat (ideal) bagi perempuan dan laki-laki (Bdk. Akhmad Syamsiah, 1995: 171). Sejak manusia lahir, konstruksi sosial ikut pula diletakkan bersamaan dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Sehingga seakan-akan perbedaan peran gender memang sudah ada dan merupakan kodrat manusia. Sosialisasi gender yang sudah sangat lama yang didukung adanya egitimasi agama dan budaya, semakin kuat interpretasi seseorang bahwa perbedaan peran, posisi dan sifat perempuan dan laki-laki adalah merupakan kodrat. Padahal gender adalah bagaimana masyarakat menata dan memberi nilai

yang berbeda pada laki-laki dan perempuan, tentang apa yang biasa dilakukan dan apa tanggungjawab mereka masing-masing yang dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan.

Gender merupakan konstruksi sosial yang membentuk identitas serta pola perilaku dan kegiatan laki-laki dan perempuan (Bemmelen, 1995:179). Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender Inequalities*). Tetapi pada kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi laki-laki terlebih lagi bagi perempuan. Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai korban dari sistem tersebut (Mansour Fakih, 2001:12).

Manifestasi dari ketidakadilan gender tersebut dapat dilihat dalam berbagai bentuk, yakni: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negative kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideology, nilai peran gender. Manifestasi ketidakadilan gender tersebut tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling terkait dan berhubungan serta saling mempengaruhi secara dialektis (Fakih, 2001: 12-23).

Secara lebih rinci manifestasi dari ketidakadilan gender diuraikan sebagai berikut:

a. Marginalisasi

Merupakan proses pemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan yang disebabkan karena ketidakadilan gender, dimana perempuan disingkirkan dari bidang kerja publik hanya karena pekerjaan rumah dianggap identik dengan perempuan. Pekerjaan domestik tidak diperhitungkan secara ekonomis.

b. Subordinasi

Merupakan perendahan pada satu jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin. Dalam rumah tangga,

masyarakat, dan negara banyak kebijaksanaan yang dibuat tanpa menganggap penting kaum perempuan. Bentuk subordinasi akan selalu berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu.

c. Stereotip

Merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender dengan cara memberikan pelabelan atau penandaan terhadap jenis kelamin tertentu (perempuan) yang akan selalu berkonotasi negatif yang merupakan keharusan yang disandang perempuan. Perempuan dinilai lebih dominan emosionalnya, suka bersolek dan penggoda, perempuan hanya dapat mengerjakan pekerjaan yang halus saja.

d. Beban ganda

Merupakan pembebanan yang diakibatkan adanya peran domestik perempuan. Perempuan identik dengan tanggung jawab pekerjaan rumah tangga, padahal pekerjaan domestik banyak sekali dan tidak ada habisnya. Disamping itu juga harus bekerja di luar rumah, sehingga beban perempuan menjadi berlipat ganda.

e. Kekerasan (Vilience)

Kekerasan adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Selain ditimbulkan oleh beberapa faktor di atas, kekerasan terhadap perempuan juga timbul karena ada anggapan bahwa laki-laki adalah pemegang supremasi dan dominasi terhadap berbagai sektor kehidupan. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

Analisis gender merupakan suatu usaha yang sistematis untuk mencatat kelaziman atau partisipasi perempuan dan laki-laki dalam suatu kegiatan, aktivitas atau program pembangunan. Analisis gender merupakan sistem analisis terhadap ketidakadilan yang ditimbulkan oleh perbedaan gender. kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan dapat menjadi program adalah perempuan, maka seolah-olah analisis gender hanya menjadi alat perjuangan kaum perempuan. Analisis gender menjadi alat tidak saja hanya bagi gerakan feminis untuk menjelaskan sistem ketidakadilan sosial, tetapi juga penting dalam setiap perencanaan program yang

melibatkan perempuan. Analisis gender membantu memahami bahwa pokok persoalannya adalah struktur dan sistem yang tidak adil, dimana laki-laki dan perempuan menjadi korban dan mengalami dehumanisasi karena sistem ketidakadilan gender. kaum perempuan mengalami dehumanisasi karena ketidakadilan gender, sedangkan laki-laki mengalami dehumanisasi karena melanggengkan penindasan gender.

Analisis gender memungkinkan suatu program atau proyek pembangunan memfokuskan pada relasi gender, ketimbang memfokuskan pada kaum perempuan saja. Dengan demikian yang ingin dijawab dari analisis gender tidak hanya kebutuhan praktis untuk merubah kondisi perempuan, melainkan juga perubahan strategis yaitu memperjuangkan perubahan posisi kaum perempuan, melainkan juga perubahan strategis yaitu memperjuangkan perubahan posisi kaum perempuan. Analisis gender membantu peneliti untuk mengarahkan perhatian tidak hanya pada perilaku laki-laki dan perempuan saja, melainkan pada sistem dan struktur sosial yang dikonstruksi oleh keyakinan atau ideologi sosial yang bias gender.

### 3. Wanita Jawa

Secara Jawa *dhosok* (akronim) wanita berarti wanita ditata (*tata-titi, tatas-titis, tatag- tutug*) dan wani tapa (*tapa- tapak- telapak*). Sesungguhnya dibawah telapak kaki wanita itu merupakan eksistensi esensi surga. Konvergensi antara tata-tapa, dzikir, imanen transender dan aksi kontemplasi itulah , maka predikat kesurgaan sangat lekat dengan wanita. Bagi orang Jawa wanita digambarkan sebagai orang yang harus dihormati oleh anaknya karena surga terletak dibawah kaki ibu (Purwadi, 2005: 560).

Pribadi wanita Jawa menurut konsep pendidikan yang terkandung dalam naskah naskah jawa adalah wanita jawa yang mendukung kebudayaan jawa. Naskah-naskah tadi berisi tentang tata cara dan sikap seorang wanita dalam menegakkan rumah tangganya agar tetap bahagia sesuai dengan adat istiadat yang berlaku (Saparinah 1982: 22). Naskah naskah yang berisi tentang pendidikan bagi

kaum wanita Jawa, banyak dijumpai dalam kasanah karya sastra, yang disebut Wulang Putri dan serat centini, jika di ungkapkan menunjukkan peran wanita di dalam rumah tangga, dengan ciri khusus wanita yang ideal dalam masyarakat Jawa pada waktu itu (Saparinah, 1982 : 27 ).

Wanita Jawa adalah wanita yang dapat berbahasa Jawa, yang masih berakar dalam kebudayaan dan cara berfikir sebagaimana yang terdapat dalam di daerah Jawa. Dengan demikian yang di maksud dengan pribadi wanita Jawa adalah keseluruhan sikap dan watak wanita yang menggunakan bahasa dan berakar budaya Jawa. Dalam serat centini (Budi Santoso, 1992: 24) diambil ajaran khusus mengenai wanita yang menuturkan tentang kehidupan wanita yang digambarkan dengan “kias lima jari tangan” yang menuturkan bahwa 1) *jempol* (ibu jari), berarti “pol ing tyas” sebagai istri harus berserah diri sepenuhnya kepada suami, apa saja yang menjadi kehendak harus dituruti; 2) *penuduh* (telunjuk) berarti jangan sekali-kali mematahkan petunjuk laki-laki atau “tuduh kakung”. Petunjuk suami tidak boleh dipermasalahkan; 3) *penunggul* (jari tengah), selalu”meluhurkan” (mengunggulkan) suami dan menjaga martabat suami; 4) *jari manis* yang berarti harus tetap manis air mukanya dalam melayani suami dan bila suami menghendaki sesuatu; 5) *jejenthik* (kelingking) berarti istri harus selalu “athak-athikan” (terampil dan banyak akal) dalam sembarang kerja melayani suami. Dalam melayani suaminya hendaknya cepat dan lembut.

Konsep wanita Jawa yang lain tertuang dalam serat Candrarini (Budi Santoso, 1992:24) yang dirinci menjadi sembilan butir, yaitu 1) setia kepada lelaki; 2). rela dimadu; 3). mencintai suami; 4) terampil dalam pekerjaan wanita; 5) pandai berdandan dan merawat diri; 6) sederhana; 7) pandai melayani kehendak lelaki; 8) menaruh perhatian kepada mertua; 9) gemar membaca buku-buku yang berisi nasehat. Keberadaan wanita masa sekarang diungkapkan sebagai suatu realitas dalam kehidupan wanita Jawa. Digambarkan pula tentang ketergantungan wanita dan dilemma yang dihadapi wanita antara tradisi yang mengikat dengan era kemajuan yang menuntut transformasi dalam kehidupan wanita Jawa.

Sebagian dari keutamaan seorang wanita dalam kaitan perannya sebagai seorang istri, sebagaimana yang harus dilakukan adalah *gemi, nastiti, dan awedi*.

*Gemi* adalah sikap hemat dan cermat dalam mengatur lalu-lintas ekonomi keluarga. *Nastiti* berarti bersikap hati-hati, cermat dan penuh perhatian dalam mengambil setiap tindakan. *Awedi* berarti takut untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma. Dengan demikian, sikap *awedi* lebih menitikberatkan pada penghormatan dan kesetiaan seorang istri terhadap suami dan terhadap Tuhan (Hilmiyah Darmawan P, 1992:160).

Citra wanita yang telah digoreskan oleh pujangga pemikir Jawa di masa lalu. Dilihat dari kaca mata masa kini wanita di dalam karya sastra tradisional hanyalah didudukkan pelampias nafsu seksual belaka. Adegan-adegan erotis yang ada pada karya sastra Jawa Kuna dan Jawa Baru klasik juga banyak memojokkan wanita untuk menduduki fungsi seksual belaka. Di dalam bagian awal Serat Bratayuda, baik di dalam babon Jawa Kunanya maupun di dalam gubahannya dalam bahasa Jawa Baru oleh Yasadipura, diceritakan bahwa ketika Kresna pergi ke Astina mengemban misi perdamaian dari pihak Pandawa, para wanita Astina berbondong-bondong melihat Prabu Kresna ini.

*Para dyah akeh kasusu / gelung wudhar tan tinolih / miwah kakembene  
lukar / nora sedyo den rawati / pembayun sinongga ngasta / kayungyun  
pesok kapit//*

*Kadya naosaken pambayun / marang narendra kang prapti / myang kang  
lagya nganggit sekar / akeleweran cinangking / kadya ta sinaosena /  
marang prabu Dwarawati//*

*Ana dyah maksih anawung / ing anak-anakan gadhing / prapta pinggiring  
dendalan / gumuyu golek den liling / lah miluwa bapakira / iku ana dyah  
kari kasusu / tan antuk enggon ing margi / sigra denya ngalap andha /  
gupuh denira ngunggahi / patung untune kang sumosot / ewa / ewa kang  
samyang ningali// (Cohen Stuart, 1860: 7)*

#### **Terjemahan :**

*Banyak wanita yang pergi bergegas / gelung yang terurai tak dipedulikan  
/ apalagi kain dada yang tersingkap / dibiarkannya ak terawat / buah  
dada dipaut dengan tangan / sebab berahi, lalu tampak peronyok karena  
terjepit//*

*Seakan mempersembahkan payudaranya/ kepada raja yang baru datang/  
Ada lagi wanita sedang menganyam bunga/ dibawa pergi terjela-jela/  
seakan hendak dipersembahkan/ kepada raja Dwarawati//*

*Ada seorang perawan baru bermain/ dengan boneka dari gading/ ia  
datang ke tepi jalan/ boneka dicanda sambil tersenyum/ ayo ikutlah itu  
bapakmu/ raja Dwarawati/ Ada perawan yang tertinggal, datang  
bergegas/ tak mendapat tempat di tepi jalan/ dengan sigap diambilnya*



*tangga/ cepat-cepat ia naik/ anak tangga patah/ si perawan jatuh terbalik//*

*Kain tersingkap terlepas/ miliknya tampak jelas/ sebab kakinya malang melintang/ seakan mencibir bibirnya/ memaki karena tak suka/ tidaklah senang pula orang-orang melihat/( Cohen Stuart, 1860: 7)*

Menurut Sadewo (1991), Bukan hanya di dalam sastra naratif saja adegan-adegan erotik itu muncul, bahkan di dalam *Serat Centhini* yang bersifat ensiklopedis dengan kandungan Islam mistik yang tinggi, bertebaran juga adegan-adegan erotik yang sangat blak-blakan. Terlalu lagi, di dalam *Serat Gatholoco* seorang gurumistik yang bernama *gatho loco* (artinya, alat untuk menggosok) berebat tentang ajaran tasawuf dengan murid wanitanya yang diberi nama Perijiwati (periji : kemaluan). Dalam sastrawi yang terkumpul itu jelas mengungkapkan bahwa apabila dilihat dari kaca mata masa kini para pujangga Jawa yang pada masa itu merupakan golongan intelaktual memandang wanita terutama dalam konteks nilai seksual. Di dalam berbagai genre sastra naratif, dan tasawuf wanita selalu didudukkan pada fungsi seksualnya. Di dalam genre sastra piwulang keadaannya sedikit berbeda. *Serat Wulangre*, gubahan Paku Buwana IV dan *Serat Wedatama*, gubahan Mangkunegaran IV sama sekali tidak menyinggung masalah wanita; *Serat Panitisastra* yang merupakan gubahan dari karya sastra Jawa Kuna oleh Paku Buwana V mengupas masalah wanita cukup berarti (Budi Santoso, 1992 :40).

Sesudah membicarakan keutamaan seorang wiku, keutamaan orang terpelajar, dan keutamaan seorang raja, dipaparkan keutamaan seorang wanita :

*Lawun mungguhing wanudya yen alaki/ oleha anal lanang / kang akendel nanging away kadi / kekendelaning singa susuta / amung sapisan kendele / .... //*

*Adapun bagi seorang wanita/ apabila ia bersuami/ hendaknya mendapatkan anak lelaki/ yang pemberani; tetapi hendaknya jangan seperti/ keberanian harimau beranak/ hanya sekali saja ia berani// (Sudewa, 1991: 46).*

Dari kutipan itu jelas bahwa wanita dinilai dari fungsi reproduksinya. Kutipan di berikut\ ini memperkuat penilaian itu “*Lawun mukyaning wanudya/ tan liyan gemuhing kang payudara kalih/ ingema neng papreman// Keutamaan bagi*

wanita/ tiada lain sintalnya kedua payudara/ untuk ditimang di ranjang tidur//”  
(Sadewa, 1991: 47).

Nilai reproduksi yang dijunjung tinggi ini maka kecantikan wanita juga diagungkan :

*Yen estri ayu kang warni/ nora nana cacade yen alapa// nadyan wijil ina papa/ tan ana sirike yekti/ ..... //*  
Adapun wanita yang cantik rupa/ tak ada cela bila diambil istri, meski ia kelahiran orang papa serta hina, sungguh tak ada cacad cela// (Sudewa, 1991: 62).

Di luar nilai reproduksi itu peran wanita dianggap remeh; dalam hal kebijakan dan kekuatan, orang dilarang mendengarkan saran dari pihak wanita.

*Ayya manut budining dyah / atemah den erang-erang ing sami / kang sujana pararja//*  
*Oleh wirang ing wong sanagari / yen anurut budining wanudya / tan wun papa tinemu / yen sisip tekeng lampus / iku kawruhana sayekti / nadyan silih patuta / ing budi rahayu / yen medal saking wanudya / away age linakon budinen dhingin / wetokna salinana//*  
*Saking ing karsanira pribadi / mangkana ngling sang parameng sastra / ana dyah bener atine / yen ana gagak pingul / lawan tunjung tuwuh ing curi / kono ana wanudya / atine rahayu / kalingane ing sujana / den prayitna yen pinarak ing pawestri / ywa kena manising ujar//*  
*Wuwuse kang wus putus ing ngelmi / kaprawolu wanudya lan priya / ing kabisan myang kuwate / guwin wiwekanipun / pan kapara astha malih / Dewi Drupadi mojar / yen wanudya iku / tan ana tuwuk ing priya / ya marmanta den prayitna barang rehning / kang amawi wanita//*

#### **Terjemahan :**

*Jangan menurutkan pikiran wanita/ akhirnya akan diejek oleh sesama/ oleh para arif dan para ulama//*  
*Akan mendapat malu dari seluruh masyarakat/ apabila orang menurutkan pikiran wanita/ tak urung papa akan didapat/ salah-salah sampai apda maut/ hal itu hendaknya engkau maklumi benar/ meski sering juga wanita itu layak/ mempunyai pikiran arif/ tetapi jika tercetus dari seorang wanita/ jangan lekas-lekas dikerjakan, pikirkan dahulu/ ubahlah penuturannya//*  
*Seakan keluar dari kehendakmu pribadi/ Beginilah kata sang bijak dalam sastra/ ada wanita lurus hati/ bila ada gagak berwarna putih/ dan bunga tunjung tumbuh di batu cadas/ di situlah baru ada wanita/ dengan hati budiman/ Maka orang arif/ hendaknya waspada apabila dihadap oleh wanita/ jangan terpikat oleh kata manis//*  
*Kata mereka yang telah khatam dalam ilmu/ wanita hanyalah seperdelapan dibandingkan pria/ dalam hal kepandaian dan kekuatan/ dalam hal kebijaksanaan/ masih dibanding delapan lagi// Dewi Drupadi berkata/ bahwa wanita/ tak ada yang puas dengan pria/ maka hendaknya*

*engkau waspada dalam segala hal/ yang mengikutsertakan wanita// (Sudewa, 1991: 71-72).*

Di dalam genre sastra novel adegan-adegan erotis seperti yang lazim ada pada sastra Jawa Klasik sama sekali menghilang. Dipandang dari segi penokohan kedudukan wanita mengalami pergeseran yang sangat besar. Apabila di dalam sastra Jawa Klasik tokoh wanita hanya tampil sebagai tokoh pembantu dan karakternya dilukis secara tidak lengkap, sebagai tokoh datar, maka di dalam genre novel klasik ini tokoh wanita, meskipun tidak menduduki peran sebagai tokoh utama, namun digambarkan sebagai tokoh yang bulat, bahkan sebagai penggerak alur.

Serat Riyanto, hasil karya R.M. Sulardi (BP 1920) yang oleh Ras (1985: 24) dianggap sebagai novel Jawa pertama yang tidak sarat didaktik, menceritakan seorang pemuda bangsawan menengah dari lingkungan kraton Surakarta yang telah mengenyam pendidikan model Eropa di Semarang dalam hal seni lukis. Tokoh utama ini konflik dengan ibunya masalah istri yang diidamkannya dan menemukan sendiri secara kebetulan sang putri idaman itu. Keseluruhan alur digerakkan oleh kedua tokoh utama itu sampai keduanya dapat bertemu sebagai pasangan pengantin, dan tampak sekali bahwa pengarang pada dasarnya ingin merumuskan bagaimana komunikasi antara pemuda dan pemudi yang saling jatuh cinta yang ideal di masyarakat Jawa. Sang gadis harus menunjukkan bahwa ia pendiam dan pemalu, sang jejak harus menunjukkan sikap sopan.

Karya sastra Jawa Klasik dan Jawa Baru yang datanya tersaji di muka tampak bahwa ada perbedaan yang cukup mendasar diantara pujangga Jawa dengan para pengarang Jawa di dalam mengukir peran wanita di dalam karyanya. Di dalam karyanya para pujangga Jawa lebih memanfaatkan wanita sebagai objek. Memang benar bahwa tokoh wanita dapat menggerakkan alur, seperti Ramayana dan Mahabharata, namun tokoh wanita penggerak alur ini tidak aktif. Kedudukan tokoh wanita semacam ini juga tampak di dalam novel Jawa awal, Serat Riyanta dan Suwarsa-Warsiyah.

Sastra Jawa Klasik adegan erotis tidak dapat diabaikan. Memang benar adegan erotis ini tidak menyangkut tokoh utama wanita, namun adegan erotis itu

terdapat dalam berbagai genre; bahkan di dalam sastra piwulang tampak bahwa wanita dinilai dari fungsi reproduksi ini dengan adegan erotis di dalam genre sastra naratif. Di dalam karya sastra Jawa Baru adegan erotis dilukiskan dengan cara yang halus sekali. Tokoh wanita telah berfungsi sebagai penggerak alur, meskipun pada novel awal sikapnya pasif, namun pada karya sastra pada zaman yang lebih kemudian tokoh wanita berfungsi sebagai penggerak alur secara aktif. Tokoh wanita di dalam Purosani dan Ngulandara tampak jelas menggerakkan alur cerita secara aktif. Masalah yang muncul adalah, perubahan dunia budaya yang bagaimanakah yang melatarbelakangi perubahan anggapan tentang wanita di antara pujangga Jawa Klasik dan pengarang Jawa Baru itu (Budi Santoso, 1992: 44-46)

Wanita Jawa juga digambarkan sebagai pribadi yang harus menurut pada suami seperti Cinta yang memabukkan dan membutuhkan dijernihkan oleh makna tembang Asmarandana yang bersedia berkorban dan asmara sifat *melik nggendhong lali*, atau bawaan hidup yang cenderung lupa diri diingatkan oleh tembang Kinanthi, yang mengandung makna simbolik tuntunan dan pedoman hidup. Pemuda-pemudi yang masih mengejar masa depan yang mengingat tembang Sinom. Mereka harus berani berjuang demi kehidupan yang lebih baik. Untuk itu perlu sifat berani sebagaimana semangat tembang Durma. Syair tembang Kinanthi ini akrab di lingkungan Jawa.

*Yen sira winengku kakung  
ywa tilar gitaning uni  
tetuladhan kuna-kuna  
kadising Rasulullah  
kang amrih utamaning dyah  
antuka swarga di*

**Terjemahan :**

*Bila engkau mendampingi suami  
jangan lupa kisah dahulu  
teladan jaman kuna  
Hadist Rasulullah  
demi keutamaan wanita  
sarana masuk surga mulia*

Kesetian wanita pada laki-laki dilukiskan pada *Serat Candrarini* seperti di bawah ini :

1. *Ngastutia tata tataning pawestri  
rebing palakrama  
ngemugna laku utama  
tuladha ingkang carita*
2. *Den asabar sadu darana ing budi  
ngawula ing priya  
supriben waluya jati  
aja ngebungken wanodya*
3. *Sayektine kudu surti ngati-ati  
nastiti ing patrap  
ngawruhi ambeging laki  
lakonana tapak brata*
4. *Aja kurang samapta talaning panti  
rumantri ing patrap  
pinataha kang patitis  
pantesan pangrukti nira*

*Terjemahan*

1. *Usahakan tata laksana wanita  
dalam hal rumah tunggu  
mementingkan laku utama  
teladan dalam cerita*
2. *Agar hati sabar lapang bud  
berbakti pada suami  
jagalah setia sejati  
hindari keangkuhan diri*
3. *Sungguh wajib selalu berhati-hati  
teliti bertindak  
memahami suami berkehendak  
lakukan puji doa*
4. *Jangan kurang kerapian wanita  
sedap bila dipandang  
cekat cepat dan tepat  
pantaskan segala pekerjaan*

Kesadaran akan diri dan lingkungannya diekspresikan oleh tembang dicapai dengan membatasi diri. Manusia jangan mengejar kesenangan dan kepuasan. Keduanya tiada akan pernah tercapai, apabila manusia tidak akan mengendalikan dirinya. Panca indra ingin selalu dimanja. Semakin dimanja, semakin menggila. Pada akhirnya orang hidup mesti, siap menghadapi akhir kehidupan, itulah *sakaratul maut* yang dapat mencapai *emating pati patitis*,

*khusnul khotimah. Tembang Megatruh*, terpisahnya badan sukma, jiwara, jasmani rokhani, memberi penerangan kepada setiap insan yang Jawa yaitu *jiwa kang jinawi*, yang mau mengedepankan aspek spiritual. Dibalik yang fana ini akan datang jaman keabadian. Dunia pewayangan menyebut sekarang *bawana langgeng*, yaitu buah dari awal kehidupan paska dunia yang kekal abadi.

Putri *mruput katri* (mendahulukan ketiga hal: *bekti, nastiti, ngati-ati*), *Bekti, nastiti*, dan *ngati-ati* hendaknya dipatrikan para putri kepada suaminya. *Bekti-sungkem, pasrah-ngalah, mbangun-turut*, dan *setya tubu* pada *guru laki* atau suami dilakukan dalam rangka sadar *lillah-fillah-billah*. Totalitas kadarmabaktian itu sekaligus demi *mendhem jero mikul dhuwur* harkat martabat serta kehormatan keluarga dan orang tua. *Gemi nastiti* meliputi sifat hemat, cermat, dan bersahaja. Ini penting diresepi mengingat banyaknya distorsi kehidupan yang disebabkan jor-joran materi. *Rasa melik nggendhong lali* (ambisi menutupi kepekaan hati) adalah sumber ketidakstabilan amal. Oleh karena, suami pada umumnya memandang permintaan istri sebagai ujian yang berat, maka sikap *gemi nastiti* perlu sekali dipertimbangkan. *Ngati-ati* berkaitan dengan *tindak tanduk, solah bawa, muna-muni. Ajining dhiri saka lathi, ajining raga saka busana, ajining jiwa saka susila*. Sikap yang mesti dihindari putri di antaranya *cula* dan *culas*. *Cula (ucul ala)* adalah perbuatan rusuh, misuh dan kasar yang memerosotkan kewibawaan. *Culas (ucul bablas)* adalah tindakan wagu, saru, dan ugal-ugalan yang menjatuhkan harga diri (Purwadi, 2005:561-563)

Keutamaan seorang wanita dalam kaitan perannya sebagai seorang istri akan dapat memberikan gambaran mengenai posisi dan kedudukan wanita. Sebuah pandangan yang sudah merupakan jargon bahwa tugas wanita sepenuhnya mengabdikan kepada suami. Hal tersebut dapat dilihat dari ajaran-ajaran yang diperlukan bagi wanita sebagai berikut : 1). *Mantep*, yaitu tak berniat kepada orang lain kecuali suaminya; 2). *Temen*, maksudnya yaitu tidak palsu terhadap Sesuatu hal, tidak berdusta dalam berbicara; 3). *Nrima*, yaitu menerima dengan ikhlas apa yang telah menjadi bagiannya; 4). *Sabar*, artinya tidak cepat marah; 5) *Bakthi*, tidak berani kepada suami, menghormati, tidak turut campur urusan suami; 6) *Gemati*, artinya cekatan melyani suami; 7). *Mituhu*, artinya taat terhadap

segala petunjuk suami; 8). *Rumekseng laki*, artinya dapat menjaga serta menyimpan rahasia suami dan tidak rela jika suaminya terkena bahaya; 9). *Weweko*, artinya kuat, sentosa dan dapat menjaga diri (Zainudin, 2000: 127).

Wanita Jawa merupakan anggota masyarakat Jawa yang mendukung kebudayaan Jawa, Haryati Subadio menyatakan bahwa kebudayaan merupakan sistem nilai dan gagasan utama sebagai hakekat kebudayaan terwujud dalam tiga sistem budaya, secara lebih terperinci lagi yaitu system ideology, system social, dan sistem teknologi (Haryati Subadio, 1985: 20). Wanita Jawa pada umumnya masih mempunyai sifat-sifat sebagaimana di gambarkan dalam strotip mengenai kelompoknya yaitu nrimo, pasrah, halus, sabar, setia serta batin dan berani menyatakan pendiriannya (Saparinah, 1982 : 155) Konsepsi tentang manusia sebagai satu-satunya organisme yang merupakan makhluk pembentuk kebudayaan, mengakui bahwa kebudayaan bersifat universal dan merupakan atribut dari semua manusia (Soerjono Soekanto, 1983: 165).

Manusia adalah makhluk sosial. Hal itu berarti bahwa manusia dilahirkan dan dibesarkan dalam suatu kelompok; karena tanpa kelompok yang membesarkannya tidak mungkin dia dapat melangsungkan hidupnya. Manusia dapat mewujudkan kebudayaan karena memiliki kemampuan untuk berkomunikasi melalui lambang. Kebudayaan menjadi milik manusia melalui proses belajar dan diajarkan kepada anggotanya melalui proses enkulturasi dan proses sosialisasi. Menurut Geertz, kebudayaan merupakan pengetahuan manusia yang diyakini akan kebenarannya oleh orang yang bersangkutan dan yang diselimuti serta menyelimuti perasaan dan emosi manusia serta menjadi sumber bagi sistem penilaian sesuatu yang baik dan yang buruk, sesuatu yang berharga atau tidak, sesuatu yang bersih atau kotor dan sebagainya. Hal ini terjadi karena kebudayaan itu diselimuti oleh nilai moral yang sumbernya adalah pandangan hidup dan ethos atau sistem yang dipunyai oleh setiap manusia (Parsudi Suparlan, 1980:238).

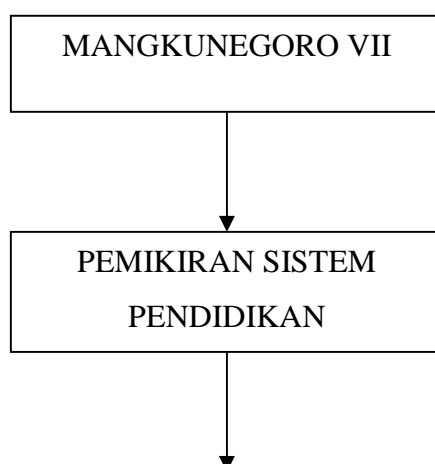
Keseluruhan dari isi serta kemampuan alam pikiran dan alam jiwa manusia dalam hal menanggapi lingkungannya yang oleh Koentjaraningrat disebut mentalitet tidak terlepas dari hubungannya dengan sistem nilai budaya

(Koentjaraningrat, 1980: 235). Kebudayaan meliputi gagasan, cara berpikir, ide-ide yang menghasilkan norma-norma, adat-istiadat, hukum dan kebiasaan-kebiasaan yang merupakan pedoman bagi tingkah lakunya dalam masyarakat. Tingkat yang lebih tinggi dan paling abstrak dari adat-istiadat adalah sistem nilai budaya merupakan konsep yang hidup dalam alam pikiran masyarakat. Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tetapi juga sebagai pendorong kelakuan manusia dalam hidup.

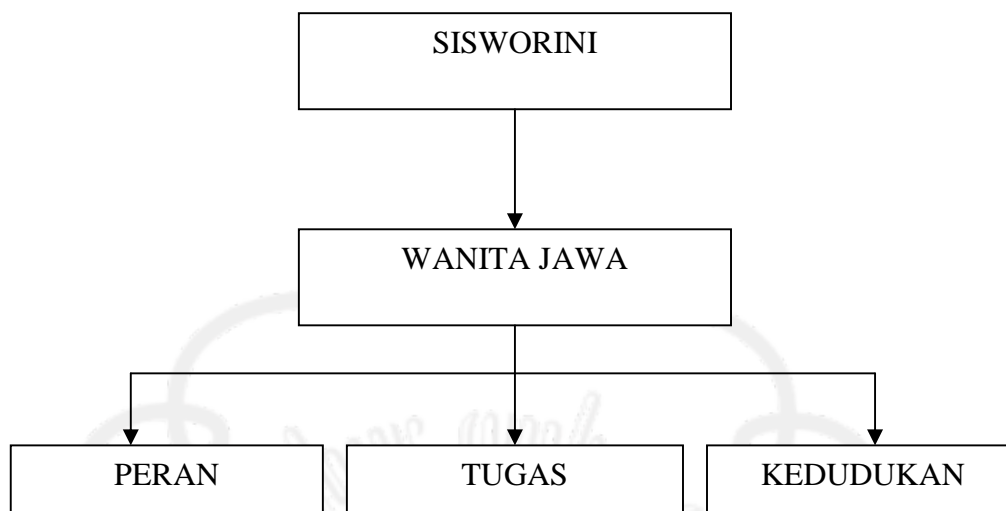
Sifat-sifat tersebut merupakan kepribadian wanita Jawa dan gambaran ideal dari wanita Jawa sehingga etika wanita Jawa dapat diwujudkan sesuai dengan nilai luhur budaya Jawa. Kepribadian wanita itu dibentuk dalam lingkungan keluarga yang telah dipengaruhi oleh sistem nilai budaya. Kepribadian wanita Jawa akan tercermin dalam sistem asalnya, yang bersifat konform atau berusaha menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan yang berlaku supaya dapat memenuhi harapan-harapan lingkungannya, meskipun tindakan-tindakan tersebut diperoleh dalam proses sosialisasi dan *enkulturasi* (Budi Santoso, 1992 : 57).

Mengenai peranan wanita Jawa, masyarakat Jawa pada umumnya masih menilai tinggi bahwa wanita setelah menikah sebaiknya tinggal dirumah, mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak karena hal tersebut sudah merupakan kodrat bagi anak wanita yaitu menikah, melahirkan dan merawat anak-anak mereka (Budi Santoso, 1992: 57). Sehingga sebagian masyarakat Jawa menganggap bahwa pendidikan bukan merupakan prioritas utama bagi wanita bahkan tidak perlu sama sekali.

## B. KERANGKA BERPIKIR





**Keterangan:**

Mangkunegoro VII adalah adipati yang memerintah Pura Mangkunegaran pada tahun 1916 sampai 1944. Beliau banyak berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dalam berbagai bidang terutama bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan Mangkunegoro VII banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Mangkunegoro VII tidak hanya mengusahakan sekolah bagi laki-laki, tetapi juga bagi kaum wanita. Karena kaum wanita masih terasa sulit untuk dapat mengenyam pendidikan yang setara dengan laki-laki. Sekolah wanita pertama di lingkungan Mangkunegaran adalah Sisworini. Pendirian sekolah ini diadakan atas pertimbangan akan pentingnya kedudukan serta tanggungjawab wanita dalam rumah tangga.

Wanita diharapkan menjadi teman sekerja laki-laki dalam keluarga yang mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh serta mendidik anak-anak hingga tumbuh menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Di sekolah ini para wanita dipersiapkan untuk memasuki kehidupan rumah tangga dengan segala tanggung jawabnya, dengan diberi bekal ilmu pengetahuan yang cukup, mengenai kerumahtanggaan dan pengetahuan berbagai macam ketrampilan. Sehingga

wanita Jawa mengerti akan peran, tugas, serta kedudukannya dalam keluarga dan masyarakat

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi dengan judul “Peranan Sekolah Sisworini Bagi Peningkatan Pendidikan Wanita Jawa (Studi Tentang Pendidikan Bagi Wanita Jawa Pada Masa Pemerintahan Mangkunegoro VII)” menggunakan metode historis. Peneliti menggunakan studi pustaka dengan memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun perpustakaan yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta
- b. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta
- c. Perpustakaan Program Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta
- d. Perpustakaan Monument Pers Nasional Surakarta
- e. Perpustakaan Reksapustaka Mangkunegaran
- f. Perpustakaan Sana Pustaka Kasunanan Surakarta
- g. Perpustakaan Daerah Kota Surakarta

Selain perpustakaan, penelitian ini mengambil lokasi di Pura Mangkunegaran

#### **2. Waktu Penelitian**

Waktu Penelitian yang digunakan adalah mulai dari setujuinya judul skripsi pada bulan Oktober 2008 dan direncanakan sampai bulan Maret 2010. Adapun jadwal pelaksanaannya sebagai berikut :

Tabel 1 : Jadwal kegiatan penelitian tentang “ Peranan Sekolah Sisworini Bagi Peningkatan Pendidikan Wanita Jawa (Studi Kasus Tentang Pendidikan Bagi Wanita Jawa pada Masa Pemerintahan Mangkunegoro VII)”

No	Kegiatan	Bulan 2008 - 20010													
		Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop
1	Pengajuan Judul	V													
2	Penyusunan Proposal		V												
3	Perizinan												V		
4	Analisis Data													V	
5	Penyusunan Laporan											V	V	V	V

## B. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah , maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1986: 7). Sementara itu Husnaini Usman (1996:42) menyebutkan bahwa metode adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan menurut Helius Sjamsuddin (1996: 2), metode ada hubungannya dengan suatu prosedur, proses atau tehnik yang sistematis dalam penelitian suatu ilmu tertentu untuk mendapatkan suatu bahan yang diteliti.

Pendapat yang dikemukakan oleh beberapa pakar di atas, dapat disimpulkan mengenai pengertian metode, yaitu suatu cara untuk berbuat dan berencana, suatu susunan atau sistem yang teratur. Metode ada hubungannya dengan prosedur atau tehnik yang sistematis dalam suatu disiplin ilmu untuk mendapatkan objek atau bahan-bahan yang diteliti.

Penelitian ilmiah, metode memegang peranan yang sangat penting terhadap penelitian yang dilakukan. Penggunaan metode penelitian menyangkut masalah kerja untuk memahami objek menjadi sasaran ilmiah yang bersangkutan, dengan demikian metode merupakan cara kerja yang utama untuk mencapai tujuan dengan menggunakan tehnik dan alat bantu tertentu. Penggunaan metode yang tepat sesuai dengan tujuan dan sifat penelitian sangat penting karena keberhasilan dari tujuan yang akan dicapai tergantung dari penggunaan metode yang tepat. Oleh karena itu, penggunaan metode hendaknya disesuaikan dengan objek yang diteliti. Dalam usaha mendapatkan data yang diperlukan, harus menggunakan metode yang tepat dengan sifat dan tujuan dari penelitian tersebut (Koentjaraningrat, 1986: 8). Berdasarkan permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini, yaitu masalah mengenai Peranan Sekolah Sisworini Bagi Peningkatan Pendidikan Wanita Jawa, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis atau metode sejarah. Hal ini didasarkan pada tema atau objek yang dikaji yaitu peristiwa sejarah yang tujuannya merekonstruksi peristiwa masa lalu.

Peristiwa masa lalu tersebut terjadi pada tahun 1916 sampai 1944 sehingga yang digunakan oleh penulis adalah metode historis. Berdasarkan permasalahan yang hendak dikaji serta tujuan yang akan dicapai, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Hal ini dikarenakan obyek yang digunakan berupa peristiwa sejarah. Kemudian proses selanjutnya adalah menguji dan menganalisis secara kritis mengenai data rekaman dan peninggalan masa lalu serta melakukan sintesa kedalam bentuk historiografi.

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, kemudian merekonstruksikan berdasarkan data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan historiografi (Gottschalk, 1986:

32) Sementara itu menurut Moh. Nazir (1983: 55), metode sejarah adalah penyelidikan yang teoritis terhadap keadaan perkembangan serta pengalaman di masa lampau dengan menimbang secara cukup teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan, sedangkan Helius Sjamsudin (1993: 3) mengemukakan bahwa metode historis adalah suatu cara untuk mengetahui sejarah dengan pemilihan prosedur yang sistematis dengan menggunakan tehnik-tehnik tertentu, pengumpulan bahan-bahan sejarah, baik arsip, perpustakaan maupun wawancara dengan tokoh sejarah yang masih hidup dan mempunyai hubungan dengan peristiwa sejarah. Lain halnya menurut Gillbert J. Garagham yang dikutip Dudung Abdurrahman (1999: 55) “Metode penelitian sejarah adalah seperangkat asa dan kaidah-kaidah yang sistematis, yang digunakan secara efektif untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis dan mengajukan sosisis dari hasil yang telah dicapai dalam bentuk tulisan”.

Dari uraian di atas, penelitian ini dilakukan melalui kegiatan mengumpulkan, menguji, dan menganalisa sumber data sejarah secara kritis serta kritik sumber, baik kritik ekstern maupun kritik intern sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan permasalahan dan kemudian menyajikannya dalam bentuk tulisan skripsi mengenai “Peranan Sekolah Sisworini Bagi Peningkatan Pendidikan Wanita Jawa”.

### **C. Sumber Data**

Sumber sejarah seringkali disebut sebagai “data sejarah”. Kata “data” berasal dari bahasa latin yaitu “*datum*” yang berarti “pemberitaan” (Kuntowijoyo, 1995:94). Jadi sumber data sejarah adalah segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung memberitahukan kepada kita tentang sesuatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lalu (Helius Sjamsuddin, 1996 : 73 ).

Dudung Abdurrahman (1999 : 31) mengatakan bahwa data sejarah berarti bahan sejarah yang memerlukan pengetahuan pengolahan, penyeleksian, dan pengkategorian sejumlah sumber yang tersedia pada dasarnya adalah verbal sehingga membuka kemungkinan bagi peneliti sejarah untuk memperoleh

pengetahuan tentang berbagai hal. Menurut Siti Gazalba (1981:88), sumber data sejarah dapat diklasifikasikan menjadi: (1) sumber tertulis, yaitu sumber yang berupa tulisan, (2) sumber lisan, adalah sumber yang berupa cerita yang berkembang dalam suatu masyarakat, (3) sumber benda atau visual, adalah semua warisan masa lalu yang berbentuk dan berupa.

Penelitian ini menggunakan sumber data tertulis. sumber tertulis dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sekunder. Adapun klasifikasi sumber sejarah itu dapat dibedakan menurut bahan, asal usul atau urutan penyampaian, dan tujuan sumber itu dibuat. Sumber, menurut bahannya dapat dibagi menjadi 2, yaitu tertulis dan tidak tertulis sumber-sumber menurut penyampaiannya dapat dibedakan menjadi primer dan sekunder (Lois Gootschalk (1986: 36). Mengemukakan bahwa :

Sumber tertulis dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber tertulis primer dan sumber tertulis sekunder. Sumber tertulis primer yaitu kesaksian dari seseorang dengan mata kepala sendiri, atau dengan panca indra lain, atau dengan alat mekanik menyaksikan peristiwa yang diceritakannya. Sedangkan sumber tertulis sekunder yaitu sumber yang ditulis oleh seseorang yang tidak terlibat langsung atau mengalami peristiwa sejarah itu. Sumber tertulis sekunder juga dapat diartikan sebagai data yang ditulis oleh orang yang tidak seaman dengan peristiwa yang dikisahkan.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan berupa sumber tertulis primer dan sumber tertulis sekunder. Sumber tertulis primer berupa dokumen- dokumen: serat-serat, naskah- naskah seperti, naskah kuno Amien Singgih, babad mangkunegaran, sumber tertulis sekunder berupa buku-buku yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, antara lain; karya budaya K.G.P.A.A. Mangkunegoro I- VIII karya Suwaji Bastomi; citra wanita dan Kekuasaan (Jawa) karya Budi Santoso; biografi BRM Soeryo Soeparto 1916-1944 karya Bernadiah Hilmiyah M.D; Mangkunegoro VII kaliyan Kabudayan Jawi karya Radjiman Wedyoningrat; *Dutch Culture Overseas* karya Frances Gouda; Pangeran Adipati Ario Mangkunegoro VII karya H. G. Cannegieter.

#### **D.Teknik Pengumpulan Data**

Metode sejarah, teknik pengumpulan data disebut heuristik. Pengumpulan data (heuristik) merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian. Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka dalam melakukan pengumpulan data digunakan teknik studi pustaka dan wawancara. Data dalam penelitian ini berupa dokumen tertulis yang berupa buku-buku, serat-serat yang memuat tentang pendidikan pada masa colonial yang diselenggarakan oleh Adipati Mangkunegoro VII dalam meningkatkan pendidikan bagi wanita Jawa.

### 1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah suatu metode penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data atau fakta yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku, literature, surat kabar, majalah yang tersimpan di perpustakaan . Studi pustaka ditempuh dengan cara membaca dan menguji sumber-sumber yang terkumpul untuk menyusun cerita sejarah (Koentjaraningrat, 1983: 3). Sejalan dengan pendapat tersebut, Kartini Kartono (1983: 28) menerangkan bahwa penelitian dalam mengumpulkan data dan informasi misalnya buku-buku, majalah, naskah, catatan kisah sejarah dan dokumen.

Keuntungan dalam menggunakan teknik studi pustaka. Menurut Sartono Kartodirjo dalam Koentjaraningrat (1983: 65),

Keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan teknik studi pustaka adalah: (1) untuk membantu memperoleh pengetahuan ilmiah yang sesuai dengan persoalan yang dipelajari, (2) memberikan pengertian dalam menyusun persoalan yang tepat, (3) mempertajam perasaan dalam meneliti, (4) membuat analisa serta membuka kesempatan memperluas pengalaman ilmiah. Dengan teknik kepustakaan, sumber yang didapat tidak mungkin dapat disimpan semua dalam ingatan, maka dalam pengumpulan data diperlukan pencatatan yang sistematis.

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut : (a). Pencarian dan pengumpulan arsip-arsip dilaksanakan di Reksa Pustaka Mangkunegaran Surakarta. Arsip-arsip yang mendukung penelitian, antara lain Serat Nayakatama, Serat Cenntini, Serat Wulangreh. Perlu diketahui bahwa perpustakaan tersebut bersifat tertutup. Maka mencari arsip-arsip tersebut, peneliti harus melalui beberapa tahapan. *Pertama*, membaca katalog, mencatat

nomor kode arsip, dan menyerahkannya kepada petugas. Setelah proses tersebut petugas akan mengambilkan arsip yang dimaksud. *Kedua*, buku-buku dan arsip-arsip yang ada di perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran tidak bisa dibawa pulang, sehingga setelah selesai membaca peneliti harus menitip fotocopy pada petugas yang akan diambil keesokan harinya, (b). Penggalan terhadap bahan-bahan pustaka lainnya, seperti buku, ensiklopedia, yang dilakukan di beberapa perpustakaan. Perpustakaan itu antara lain ; perpustakaan UNS pusat, Perpustakaan FKIP dan Perpustakaan Prodi Sejarah, serta Perpustakaan Monumen Pers Surakarta dan perpustakaan Fakultas Sastra Sejarah UNS Surakarta. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan buku-buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar yang relevan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca dan mencatat sumber- sumber data yang dibutuhkan baik itu sumber primer maupun sumber sekunder.
3. Memfotocopi dan mencatat literature perpustakaan yang dianggap penting dan relevan dengan masalah yang diteliti.

Usaha mempermudah mengumpulkan data penelitian melalui studi pustaka, dapat digunakan media katalog yang ada. Menurut Louis Gottchalk (1986:46) laboratorium yang lazim bagi sejarawan adalah perpustakaan dan alat yang paling bermanfaat bagi seorang sejarawan adalah katalogus.

Katalog perpustakaan terdapat keterangan mengenai pengarang. Oleh karena itu, jika seorang mengingat beberapa kata kunci (*key words*) yang terdapat dalam subyek yang dibahas, boleh jadi akan ditemukan buku atau artikel yang kemudian dapat dijadikan sumber data (Louis Gottchalk, 1986:46)

## 2. Wawancara

*Interview* atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. *Interview* (berbincang-bincang), tanya jawab, asal kata *entrevue* artinya perjumpaan sesuai dengan perjanjian



sebelumnya. Juga dari kata *entre*, *inter* dan *voir/videre* yang berarti melihat. *Interview* adalah tanya jawab lisan dengan maksud untuk dipublikasikan (Kartini Kartono, 1980: 71). Hal ini sependapat dengan Susanto (2006:128) yang menyatakan bahwa wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Maksudnya adalah proses memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan responden (*informan*). Dalam proses *Interview* ini ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Pihak yang satu berfungsi sebagai pengejar informasi atau penanya, disebut pula sebagai interviewer atau *informan hunter*. Sedangkan pihak yang lainnya berfungsi sebagai pemberi informasi (*information supplier*), *interview* atau informan.

Benny dan Hughes (1956:138), menyatakan:

Wawancara bukan sekedar alat atau kajian (studi). Wawancara merupakan seni kemampuan sosial, peran yang kita mainkan memberi kenikmatan dan kepuasan. Hubungan yang berlangsung dan terus menerus memberi keasyikan, sehingga kita berusaha terus menerus untuk menguasainya. Karena peran memberikan kesenangan dan keasyikan, maka yang dominan dan terkuasai akan membangkitkan semangat untuk berlangsungnya wawancara.

Irawati Singarimbun dalam Masri dan Sofian Effendi mengemukakan bahwa hasil wawancara yang baik tergantung dari beberapa faktor, yaitu pewawancara, responden (*interviewee*), topic penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi *interview* (1982: 145-146).

*Interview* pada penelitian “Peranan Sekolah Sisworini Bagi Peningkatan Pendidikan Wanita Jawa (Studi tentang Pendidikan Wanita Jawa pada Masa Pemerintahan Mangkunegoro VII)” dilaksanakan di Pura Mangkunegaran. Wawancara ditunjukkan pada pemimpin perpustakaan Rekso Pustoko, para abdi dalem, petugas administrasi Pura Mangkunegaran; dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya penggunaan bahasa yang tepat agar dapat menunjang pelaksanaan wawancara serta mempertimbangkan waktu saat pelaksanaan wawancara.

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses pencarian dan perancangan sistematis semua data yang terkumpul agar peneliti mengetahui makna yang telah ditemukan dan disajikan pada orang lain secara jelas (Sutopo, 1990: 58). Analisis data adalah proses pengorganisasian data ke dalam pola kategori dan satuan uraian data sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang ada dalam data (Lexy J. Moleong, 1984: 16).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis historis, yaitu teknik analisis yang mengutamakan pada ketajaman dalam melakukan interpretasi data sejarah. Interpretasi diperlukan karena fakta-fakta tidak bisa berbicara sendiri dan kategori dari fakta-fakta sejarah mempunyai sifat yang kompleks. Analisis historis, yaitu analisis yang mengutamakan ketajaman dalam melakukan interpretasi data sejarah atau suatu analisis yang memiliki ketajaman dan kekuatan dalam menginterpretasikan data sejarah. Interpretasi perlu dilakukan karena data yang dijadikan bahan utama oleh para sejarawan untuk menyusun cerita sejarah tidak dapat bicara sendiri (Sartono Kartodirjo, 1992:85)

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengklasifikasikan data kedalam pola, kategori dan satuan urutan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang terdapat dalam data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis historis yaitu teknik analisis yang mengutamakan pada ketajaman dalam melakukan interpretasi data sejarah. Analisis sejarah bertujuan untuk melakukan sintesis atau sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu kedalam suatu interpretasi yang menyuluruh (Barkhofer dalam Dudung Abdurrahman, 1994: 64). Adapun kegiatan yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data sejarah adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan kritik sumber, baik kritik ekstern maupun kritik intern. Kritik ekstern yaitu memberikan penilaian terhadap keaslian atau sumber dengan melihat sisi luarnya, misalnya jika penulis menggunakan serat maka penulis akan melihat tinta yang dipakai, jenis kertas yang dipakai, bahasa yang digunakan bahasa Jawa atau bukan, ungkapannya, kalimatnya, dan

lain-lain. Sedangkan kritik intern yaitu memberikan penilaian terhadap isi sumber, apakah sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak, seperti; identifikasi penulis, cara berpikir penulis apakah mengarah pada perhatian hanya kesatu jurusan atau lebih luas lagi, latar belakang dokumen tersebut dibuat (verifikasi pernyataan pembuat pengarang), dan unsur subyektivitas pengarang.

2. Menginterpretasikan data yang telah terkumpul dengan cara membandingkan, mengkaitkan, atau menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lain serta mengkaitkannya dengan hasil wawancara. Dan akhirnya dapat diketahui hubungan sebab-akibat dari suatu peristiwa masa lampau yang menjadi objek penelitian dan mendapatkan fakta-fakta sejarah yang menjadi benar-benar relevan. Fakta-fakta sejarah itu kemudian diseleksi, diklarifikasikan, dan ditafsirkan, barulah kemudian fakta-fakta tersebut dirangkai untuk dijadikan bahan penulisan, penelitian yang utuh dalam sebuah karya ilmiah.

## F. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah penelitian dari pembuatan proposal sampai pada penulisan hasil penelitian historis. Melakukan penelitian sebelumnya harus membuat prosedur penelitian karena dapat memudahkan cara kerja dan memperlancar jalannya penelitian. Menentukan tema yang akan dipilih dan diteliti merupakan langkah awal sebelum membuat rencana kerja dari persiapan membuat proposal sampai dengan penulisan hasil penelitian.

Adapun prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pengajuan Judul

Judul yang di pilih dalam penelitian ini adalah “ **Peranan Sekolah Sisworini Bagi Peningkatan Pendidikan Wanita Jawa (Studi Kasus Tentang Pendidikan Bagi Wanita Jawa Pada Masa Pemerintahan Mangkunegoro VII)**”, selanjutnya judul tersebut diajukan kepada Ketua Program Pendidikan Sejarah untuk mendapatkan persetujuan dan

mendapatkan pembimbing guna membimbing peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

## **2. Penyusunan Proposal**

Langkah selanjutnya adalah berkonsultasi dengan pembimbing mengenai judul tersebut kepada pembimbing yang telah ditentukan dan kemudian mengajukan proposal penelitian. Adapun proposal penelitian terdiri dari BAB I latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. BAB II tentang kajian teori dan BAB III tentang metodologi penelitian.

## **3. Perijinan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti meminta izin kepada pembimbing, Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Ketua Jurusan serta Pembantu Dekan I. Setelah mendapat izin untuk melakukan penelitian, maka peneliti mulai melaksanakan penelitian sesuai dengan tema dan judul penelitian.

## **4. Pelaksanaan Penelitian**

Sesuai dengan tema yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu mengenai peristiwa yang telah terjadi, maka metode yang digunakan adalah metode histories. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian yang menggunakan metode histories adalah sebagai berikut:

### **1. Heuristik**

Heuristik adalah kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tertulis, cetak, dan sumber lain yang relevan dengan penulisan ini. Hal tersebut sependapat dengan Hellius Syamsuddin (1994:14) yang menyatakan heuristik adalah pengumpulan sumber-sumber sejarah. Menurut Nugroho Susanto sumber sejarah perlu adanya pengklasifikasian atau penggolongan agar proses penelitian tidak mengalami kesulitan. Sumber sejarah bisa berupa bagian politik, ekonomi, sosial, budaya maupun militer (Nugroho Notosusanto, 1971: 73). Menurut Sidi Gazalba (1981: 15) Heuristik adalah kegiatan mencari bahan atau menyelidiki sumber sejarah untuk mendapatkan bahan penelitian. Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data dan pengklafisikasian baik dari sumber data maupun sejenisnya sehingga akan

mempermudah proses penelitian yang dilakukan. Penulis berusaha mengumpulkan sumber atau data-data yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji, baik sumber primer maupun sumber skunder yang relevan dengan materi penelitian melalui tehnik pustaka. Tehnik pustaka dilakukan di Perpustakaan Pusat UNS, Perpustakaan FKIP, dan perpustakaan Program Sejarah. Sumber primer ditemukan di Perpustakaan Reksopustoko Mangkunegaran Surakarta.

Sumber atau data sudah terkumpul, kemudian penulis berusaha membaca, mencatat sumber-sumber tertulis tersebut berdasarkan periode waktu secara kronologis, serta memfotocopy literatur-literatur perpustakaan yang dianggap penting dan relevan dengan masalah penelitian. Selain dengan tehnik studi pustaka juga menggunakan tehnik wawancara dilakukan dengan para priyayi yang berada didalam Pura Mangkunegaran dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya penggunaan bahasa yang dapat menunjang pelaksanaan wawancara.

## 2. Kritik

Kritik merupakan kegiatan untuk menyelidiki data yang diperoleh termasuk data yang otentik dan dapat dipercaya atau tidak. Setelah data yang diperlukan terkumpul, peneliti mengklasifikasikan data yang tidak otentik dan data yang otentik. Kritik sumber adalah salah satu kegiatan dalam metode sejarah yang dilakukan untuk memilih, menyeleksi, mengidentifikasi serta menilai sumber atau data yang akan digunakan dalam penulisan sejarah kritis. Dalam penelitian ini, sumber dilakukan dengan dua cara yaitu;

### a. Kritik Intern:

Kritik intern berhubungan dengan kredibilitas isi dari sumber sejarah. Kritik intern merupakan kritik terhadap sumber data yang telah ditemukan dengan meneliti isinya, apakah isi pernyataan fakta- fakta, dilihat siapa penulisnya. Kritik ini bertujuan untuk menguji kredibililitas dari sumber sejarah apakah isi, fakta dan ceritanya dapat dipercaya dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Dalam kritik intern ini cara yang

ditempuh, yaitu dengan cara membandingkan dan menghubungkan data dari satu sumber dengan data dari sumber lain, kemudian dipastikan data yang dapat diuji dan dipercaya kebenarannya.

b. Kritik Ekstern:

Kritik ini berhubungan dengan keaslian sumber berkaitan dengan otentik tidaknya sumber data yang berhubungan dengan penelitian. Keaslian sumber tersebut (otensitas) yang berkenaan dengan segi fisik dari sumber yang ditemukan, seperti: bahan (kertas atau tinta) yang digunakan, jenis tulisan, gaya bahasa, hurufnya, dan segi penampilan yang lain. Menurut Dudung Abdurrahman (1999: 59), uji otensitas minimal dilakukan dengan pertanyaan kapan, dimana, siapa, bahan, apa serta bentuknya bagaimana sumber itu dibuat. Sebelum semua kesaksian yang dikumpulkan oleh sejarawan dapat digunakan untuk merekonstruksi masa lalu, maka terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan ketat. Fungsi kritik eksternal adalah memeriksa sejumlah sumber itu (Hellius Syamsuddin, 1994:49). Adapun yang dimaksud dengan kritik eksternal adalah suatu penelitian atas asal-usul sumber, suatu pemeriksaan terhadap catatan dan peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin, dan untuk mengetahui sejak asal mulanya sumber itu telah diubah oleh orang-orang tertentu atau tidak. Dalam penelitian ini, kritik yang penulis lakukan dimulai dengan kritik ekstern pada sumber yang telah terkumpul. Kritik ekstern dilakukan dengan melihat tanggal, bulan, tahun pembuatan sumber dan siapa pengarangnya. Misalnya, dalam naskah kuno milik Amien Singgih yang masih menggunakan bahasa Indonesia tempo dulu dan diterbitkan pada tahun 1944 yang memuat mengenai kepedulian Mangkunegoro VII dalam dunia pendidikan. Penulis berpendapat bahwa Naskah Amien Singgih ini dapat dipertanggung jawabkan karena mengingat data-data yang didapatkannya merupakan hasil penelitian dari transkrip-transkrip

kuno. Selain itu kritik ekstern juga dapat dilakukan dengan meneliti segi fisik sumbernya, misalnya buku- buku yang memuat mengenai kehidupan Mangkunegoro VII selama memerintah Mangkunegaran dari tahun 1916 hingga 1944 merupakan buku yang langsung ditulis oleh pengarangnya yang pernah secara langsung bersinggungan dengan Mangkunegoro VII atau langsung bertatap muka dengan Mangkunegoro VII bahkan bisa dikatakan dekat dalam suatu peristiwa tetentu misalnya saja sebuah buku karangan orang Belanda bernama Cannegieter dimana pernah berkesempatan berkenalan dengan Mangkunegoro VII saat Mangkunegoro VII mengadakan perjalanan ke Belanda dan buku tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kebanyakan buku- buku yang didapatkan oleh penulis adalah buku yang tulisan aslinya dalam bahasa Belanda dan banyak yang sudah diterjemahkan.

Tahap berikutnya setelah kritik ekstern ialah kritik intern. Kritik intern digunakan untuk memastikan kebenaran isi sumber yang diperoleh penulis. Dari beberapa transkrip naskah yang ada serta buku- buku yang didapat oleh penulis, penulis melakukan perbandingan isi naskah yang satu dengan yang lainnya sehingga didapatkan fakta-fakta sejarah yang benar-benar relevan dengan tema penelitian. Misalnya naskah kuno Amien Singgih dari segi fisiknya bahan kertasnya sudah lapuk terlihat seperti naskah kuno dan isinya menerangkan usaha- usaha yang dilakukan oleh Mangkunegoro VII dalam memajukan bidang pendidikan di Surakarta dengan buku yang ditulis oleh Bernadinah Hilmiyah merupakan buku kenang- kenangan kepada Mangkunegoro VII selama berkuasa memimpin Mangkunegaran. Dari perbandingan ini, diharapkan akan diperoleh fakta sejarah yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah.

### 3. Interpretasi

Interprestasi merupakan kegiatan- kegiatan menafsirkan dan menentukan makna serta hubungan dengan fakta- fakta yang ada. Interpretasi atau

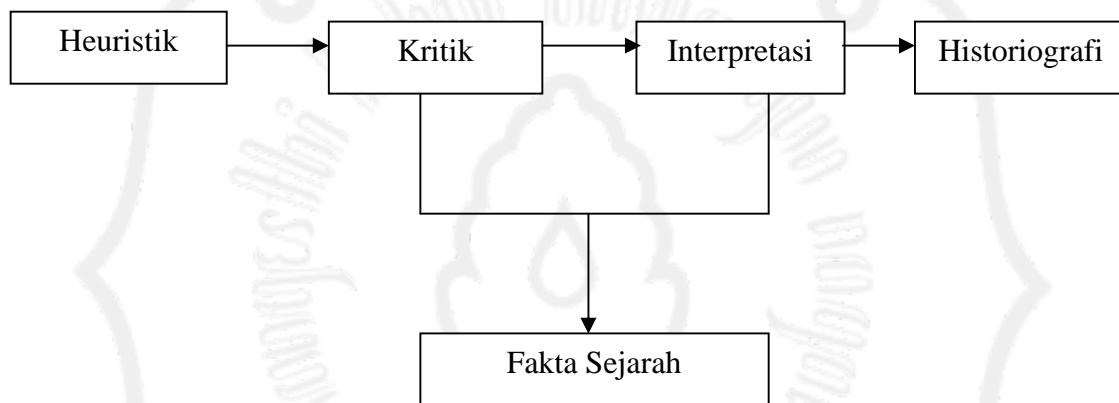
penafsiran sejarah sering disebut dengan analisis sejarah. Kegiatan ini dilakukan oleh peneliti dengan cara menghubungkan dan membandingkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain kemudian disintesis. Peneliti berusaha untuk menafsirkan data yang diperoleh, kemudian mencari kaitan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Setelah itu data yang saling berkaitan dihubungkan sehingga dapat diketahui hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa masa lampau yang menjadi objek penelitian. Kemudian sumber tersebut ditafsirkan, diberi makna dan ditemukan arti yang sebenarnya sehingga dapat dipahami makna tersebut sesuai dengan pemikiran yang logis berdasarkan obyek penelitian yang dikaji. Dengan demikian dari kegiatan kritik sumber dan interpretasi tersebut dihasilkan fakta sejarah atau sintesis sejarah. Dalam melakukan interpretasi, peneliti berusaha menghilangkan unsur subyektivitas.

#### 4. Historiografi

Historiografi merupakan langkah yang terakhir di dalam suatu penelitian. Langkah ini merupakan kegiatan menulis jejak sejarah yang dikumpulkan, dianalisis, ditafsirkan setelah bahan tersebut dikritik dan dianalisis sehingga tersusunlah hasil penelitian yang berwujud skripsi tentang “Peranan Sekolah Sisworini Bagi Peningkatkan Pendidikan Wanita Jawa” atau dengan kata lain menulis cerita sejarah dengan bahan yang sudah otentik sehingga dalam penelitian tersebut sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam hal ini imajinasi sangat diperlukan untuk merangkai fakta satu dengan yang lain sehingga menjadi suatu kisah sejarah yang menarik. Dalam kegiatan ini tentu saja diperlukan kemahiran dalam memilih dan merangkai kalimat serta penggunaan bahasa yang baik dan benar. Peneliti juga tidak lupa memperhatikan unsur keindahan bahasa sehingga didapat cerita sejarah yang diharapkan mampu menarik minat pembaca.



Tahap- tahap prosedur penelitian dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



#### BAB IV

#### HASIL PENELITIAN

##### A. Mendidik Gadis- Gadis Jawa

Sebelum abad kedua puluh orang Indonesia hanya mengenal satu jenis pendidikan saja yaitu sekolah-sekolah agama Islam dalam berbagai bentuk (langgar, surau, pesantren). Disana dilatih pengajian Al-Quran dan mempelajari dan mempercayai syariat Islam (H. Baudet dan J. J. Brugmans, 1987:176). Menurut Brugmans, Gubernur Jendral Van der Capellen hendak melaksanakan satu jenis pendidikan yang berdasarkan pada pribumi murni, secara teratur dan

disesuaikan dengan masyarakat desa, yang dihubungkan erat pada pendidikan Islam yang sudah ada sebelumnya. Dengan gaya optimis, Brugmans mengatakan bahwa “Walaupun kadang-kadang lemah dan seringkali putus, kebijaksanaan pemerintahan Belanda hampir selalu sama yaitu: harus menghormati unsur pribumi masyarakat dan keengganan menolak kebudayaan asli dalam hubungannya dengan kebudayaan asing yang bercorak Barat” (Karel A. Steenbrink, 1974: 2)

Pemikiran terhadap sejarah pendidikan ini diilhami oleh sifat kurang senang terhadap politik asosiasi dan oleh sikap positif mempertahankan unsur ketimuran. Tokoh pertama dalam kalangan pegawai pemerintah kolonial Belanda yang secara penuh untuk pendidikan bukan Eropa adalah Inspektur pendidikan pribumi yang pertama yaitu J. A. Van Der Chijs. Pada tahun 1865, setahun setelah menjabat sebagai inspektur pendidikan, sudah menyesuaikan pendidikan Islam yang ada, berdasarkan alasan teknis pendidikan, menyatakan bahwa:

“Walaupun saya sangat setuju kalau sekolah pribumi diselingi dengan kebiasaan pribumi, namun saya tidak menerimanya karena kebiasaan tersebut terlalu jelek, sehingga tidak dapat dipakai dalam sekolah pribumi.” Yang dimaksudkan kebiasaan jelek adalah membaca bahasa Arab tanpa tahu pengertiannya, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai titik tolak untuk mengembangkan suatu sistem pendidikan umum” (Karel A. Steenbrink, 1974: 3).

Keinginan untuk mengembangkan satu sistem pendidikan umum bagi semua orang pada pergantian abad ke dua puluh, beberapa tokoh berpikir untuk mencari kemungkinan melibatkan pendidikan Islam dalam pengembangan tersebut. Hal itu disebabkan karena pendidikan Islam tersebut dibiayai oleh rakyat sendiri dan dengan demikian pendidikan umum akan dapat merealisasikan dengan biaya yang relatif murah. Akan tetapi dengan alasan politis, penggabungan sistem tersebut tidak terlaksana, sebagai akibat konsekuensi logis dari kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda yang tidak mau campur tangan dalam persoalan Islam. Pada tahun 1888 Menteri kolonial menolak memberikan subsidi

kepada sekolah-sekolah Islam karena campur tangan Gubernur Jendral yang tidak mau mengorbankan keuangan negara untuk sekolah-sekolah tersebut. Dan pada akhirnya sekolah Islam semenjak itu mengambil jalan sendiri, lepas dari Gubernemen, tetap berpegangan pada tradisinya sendiri, tetapi juga terbuka untuk perubahan dalam tradisi tersebut (Karel. A. Steenbrink, 1974: 6-7).

Perkembangan pendidikan bagi kaum pribumi diusahakan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1884 setelah adanya sistem tanam paksa di tahun 1830 sampai 1878 yang memberikan keuntungan bagi negeri Belanda sebesar 800 juta golden. Penduduk di beberapa daerah diwajibkan menanam sebagian tanahnya dengan tanaman yang laku untuk dijual dipasaran Eropa, misalnya: kopi, tebu, kapas, dan sebagainya harus diserahkan kepada pemerintah dengan hasil yang menguntungkan itu membuat negeri Belanda kaya (Redja Mudyaharjo, 2001: 253).

Menjelang akhir abad ke 19, Belanda secara mendadak menyadari keterbelahan posisi internasionalnya di Asia. Dengan kata lain pentingnya Hindia bagi Belanda mendukung keinginan Belanda untuk memainkan peran bawahan yang penting dalam pergaulan internasional. Sehingga memaksa Belanda untuk secara cermat dan bijaksana mengelola tanah jajahannya yaitu Hindia Belanda. Bagaimanapun juga *cultuurestelsel* (sistem tanam paksa) yang diterapkan oleh Gubernemen Jendral Johhaness van de Bosh sekitar tahun 1830, terbukti sangat efektif dalam mendatangkan penghasilan bagi bangsa Belanda pada tahun 1851-1860, penghasilan itu mencapai jumlah yang menakjubkan yaitu 31% dari keseluruhan pendapatan pemerintah (Frances Gouda, 1995: 52).

Pada tahun 1884 Gubernur Jendral telah menerima kuasa untuk menggunakan biaya sebesar f 25000, bagi pendirian sekolah-sekolah untuk kalangan orang Jawa, istimewa bagi pendidikan pegawai-pegawai bangsa pribumi (H. Baudet dan I. J. Brugmans, 1987: 179). Perolehan keuntungan yang besar tersebut diberikan oleh Gubernur Djendral pada tahun 1848. Ini adalah usul dari Van Deventer yang nantinya menjadi titik tolak lahirnya politik Etis atau politik balas jasa (Soedomo Hadi, 2005: 117). Menteri Fransen van de Putte telah menetapkan bahwa harus diupayakan suatu keadaan, dimana penduduk pribumi

mendapat kesempatan untuk memperoleh pengajaran. Dan pada saat itu kegiatan tersebut diperluas sehingga pada tahun 1864 terdapat 186 sekolah pribumi, maka dalam tahun 1882 meningkat menjadi 512 sekolah (H. Baudet dan J. J. Brugmans, 1987:179).

Sekolah yang didirikan oleh Gubernur Hindia Belanda pada abad kesembilan belas terlalu mahal biayanya. Pendidikan tenaga pengajar terlalu mahal, gajinya bergerak ditingkat yang terlalu tinggi, gedung-gedung sekolah yang dikonstruksi oleh Departemen Pekerjaan Umum terlalu indah sehingga hanya kaum *priyayi* dan bangsawan yang mampu untuk memasuki sekolah-sekolah tersebut sedangkan masyarakat lapisan bawah/ *wong cilik* tidak dapat menjangkau sekolah tersebut karena keterbatasan biaya (H. Baudet dan I. J. Brugmans, 1987:181).

Pada tahun 1892, sekolah-sekolah pribumi dipecah menjadi dua kelompok, ada sekolah-sekolah “*kelas satu*”, yang istimewa diperuntukan bagi anak-anak para pemuka seperti anak *priyayi*, aristokrat dan anak-anak wedono serta sekolah “*kelas dua*” bagi kalangan pribumi biasa yang biayanya jauh lebih murah. Sekolah kelas satu tersebut tumbuh menjadi HIS pada tahun 1914 dengan bahasa Belanda sebagai pengantar (H. Baudet dan I. J. Brugmans, 1987:184).

Murid-murid yang bersekolah di sekolah-sekolah Belanda mayoritas adalah anak laki-laki, jarang sekali terdapat anak perempuan yang bersekolah kecuali anak *priyayi* dan bangsawan. Kesempatan bersekolah bagi perempuan pribumi semakin kecil karena sekolah-sekolah di Jawa dimaksudkan untuk mendidik pegawai pemerintahan. Konsekuensinya adalah yang pertama hanya anak laki-laki yang diterima dan kedua, anak *priyayi* diberikan prioritas utama. Maka anak-anak perempuan mengalami berbagai rintangan dalam mengikuti pendidikan formal. Agama Islam, agama mayoritas penduduk Jawa pada masa itu masih ortodoks dan menentang pendidikan formal untuk gadis-gadis.

Penduduk sendiri tidak melihat adanya manfaat gadis-gadis dididik dengan cara yang sama seperti anak pria. Gadis-gadis hanya memegang peranan penting dalam rumah tangga dan di sawah sehingga tidak perlu sekolah (S. Nasution, M. A, 2001: 46-47). Halangan-halangan sosial tersebut masih

terlampau kuat untuk mengizinkan anak wanita menikmati pendidikan yang sama seperti anak laki-laki. Disamping itu semua sekolah menggunakan model pembauran jenis kelamin, namun anak perempuan lebih jarang hadir karena keberatan para orang tua Jawa jika anak perempuan mereka satu kelas dengan anak laki-laki (Frances Gouda, 1995:142). Seperti kritikan Frances Gouda kepada tajuk rencana *De Taak* pada tahun 1918, dimana ditulis bahwa pendidikan bagi wanita Jawa diutamakan bagi anak-anak perempuan dari kalangan atas bukannya gadis-gadis miskin di desa atau kampung, yang bekerja sejak subuh hingga senja dan hanya memiliki sedikit waktu untuk menikmati indahnya pendidikan (Frances Gouda, 1995: 137). Jelas menggambarkan kondisi wanita Jawa terutama dari kalangan bawah yang masih sulit untuk menikmati pendidikan.

Dekade setelah tahun 1900-an, imbauan idealis untuk meningkatkan derajat (*apheffing*) bangsa Indonesia secara umum melalui peningkatan kedudukan pribumi, memberi inspirasi dalam pendirian serangkaian lembaga pendidikan swasta. Sekolah ini dirancang khusus untuk mendidik para gadis Jawa dan mempersiapkan mereka menghadapi tugas sebagai ibu (Frances Gouda, 1995:137).

Pada kurun waktu itu, latar belakang pendidikan membantu meningkatkan kesadaran orang pribumi istimewa yang hidup di pulau Jawa dan mulai membela hak-hak perempuan untuk pendidikan, adalah Raden Ajeng Kartini, putri bupati Jepara dari selirnya, Ngasirah. Kartini (1879- 1904) dan kedua adik perempuannya diizinkan oleh bapak mereka bersekolah di sekolah Eropa. Pada masa itu merupakan hal istimewa sekali jika anak perempuan *priyayi* Jawa bergaul luwes dengan anak Belanda dan Indo.

Kartini berhasil meresap gagasan serta kebudayaan Barat (Tinneke Helwig, 2007: 31). Perjuangan R. A. Kartini untuk bertindak membela hak-hak perempuan dimana masih terdapat perbedaan perlakuan terhadap lelaki dan perempuan Jawa, ketidakadilan terhadap kaum perempuan, langkanya kesempatan bersekolah bagi kaumnya serta perjodohan dan poligami. Menurut Kartini tradisi di Jawa menyiratkan segala sesuatunya untuk laki-laki dan tak ada satupun untuk

perempuan. Perempuan Jawa di desa membanting tulang dari matahari terbit hingga terbenam di sawah atau di perkebunan teh, kopi, atau tebu milik orang Eropa yang tersebar di tanah Jawa selain itu juga ada yang menjadi pembantu dalam keluarga Eropa atau rumah tangga bangsawan, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendesak (Frances Gouda, 1995:151). R. A. Kartini, tiga tahun setelah wafat pada tahun 1904 dibuka sekolah pertama bagi anak perempuan dan lambat laun pendidikan bagi perempuan mulai diterima di masyarakat (Tinneke Helwig, 2007: 32).

Kematian yang terlalu cepat juga sangat mempengaruhi penduduk kolonial Eropa Hindia Belanda yang berpandangan etis baik laki-laki maupun perempuan Belanda yang idealistis yang mengabdikan untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan kolektif penduduk pribumi dengan cara melindungi mereka dari ketidakadilan dan perlakuan semena-mena (Frances Gouda, 1995:151). Suatu gerak nurani yang sangat berarti untuk melindungi pendidikan, tiba dengan politik etis pada tahun 1901. Kebijakan itu merupakan hasil kesadaran yang meluas di kalangan penduduk Belanda bahwa Belanda berhutang budi terhadap Hindia Belanda. Pendidikan tercantum pada baris pertama daftar prioritas kaum Etis (Tinneke Helwig, 2007: 32). Menurut Frances Gouda politik etis lahir sebagai tanggapan penuh penyesalan dan rasa bersalah, beliau mengemukakan bahwa peran Belanda di Hindia seyogyanya berbentuk suatu “*voogdijdschap*” (perwalian atau pembimbing) moral dimana kebijakan kolonial seharusnya terfokus pada pendidikan dan pengentasan rakyat Indonesia (Frances Gouda, 1995: 53).

Kedudukan wanita Jawa lebih menekankan pada urusan rumah tangga, di Jawa rumah tangga adalah pusat segala-galanya. Dapatlah dikatakan juga bahwa tempat seorang wanita dalam rumah tangga adalah tempatnya juga dalam masyarakat (Maria Ulfah Subadio, 1994:41). Adat dan kebiasaan tersebut merupakan salah satu penghambat wanita memperoleh pendidikan sehingga tidak salah jika R. A. Kartini memperjuangkan nasib wanita supaya wanita tidak dianggap *konco wingking* saja yang hanya mengurus rumah tangga dan tidak

perlu menikmati pendidikan yang tinggi sama halnya seperti apa yang didapatkan oleh laki-laki.

Tulisan-tulisan Kartini yang diterbitkan di Belanda dengan judul *Door duisternis tot licht* (Habis Gelap Terbitlah Terang). Dengan segera kumpulan tulisan tersebut meraih sukses besar dikalangan publik pembaca Belanda. Royalti buku tersebut, bersama dengan sumbangan pribadi dan subsidi pemerintah mendanai berdirinya Yayasan Kartini pada tahun 1913, dimana pada tahun 1916 telah membuka tujuh sekolah swasta di Semarang (1913), Batavia (1914), Madiun (1914), Bogor (1914), Malang (1915), Cirebon (1916), dan Pekalongan yang khusus memberi pendidikan dasar kepada anak-anak perempuan bangsawan pribumi. Sebagai kelanjutan logis, Yayasan Van Deventer, didirikan pada tahun 1917, menyelenggarakan sekolah berasrama di Semarang, Malang, Bandung dan Solo untuk pendidikan lanjutan (*voortgezet*) bagi gadis-gadis Indonesia guna melatih perempuan Jawa sebagai guru sekolah (Frances Gouda, 1995:151-153).

Selain membuka sekolah kepada anak-anak perempuan bangsawan pribumi, Yayasan Kartini juga membuka tiga sekolah *istri*, atau sekolah pribumi kelas dua untuk para gadis di Bogor (1924), Batavia (1927), dan Jatinegara (1928). Dengan menyamakan kurikulum sekolah pribumi kelas dua yang didukung pemerintah, meski dilengkapi dengan kursus-kursus pengetahuan ekonomi rumah tangga yang dirancang untuk mempersiapkan gadis-gadis pribumi dalam tugasnya dimasa depan sebagai ibu rumah tangga. Sekolah *istri* dengan cepat mampu menarik perhatian murid perempuan dalam jumlah yang besar (Frances Gouda, 1995:153-154).

Pelopor penggerak pendidikan bagi wanita Jawa khususnya, Kartini mampu meningkatkan peranan dan kedudukan wanita lebih layak dalam kehidupan melalui pendidikan. Wanita pantas disejajarkan dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan dan tidak dipungkiri melalui perjuangannya, Kartini memberikan inspirasi kepada para penerus untuk melanjutkan perjuangannya dalam meningkatkan pendidikan bagi Bangsa Indonesia terutama kaum perempuan dan dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh Adipati Mangkunegoro VII dalam memajukan pendidikan di

Mangkunegaran serta kaitannya dalam meningkatkan pendidikan bagi wanita Jawa sama halnya seperti apa yang dilakukan oleh R. A. Kartini.

### **B. Peranan Mangkunegoro VII Dalam Dunia Pendidikan**

Mangkunegoro VII lahir pada tanggal 12 Desember 1885, nama kecilnya adalah Raden Mas Ario Suryo Suparto, adalah keponakan dari Mangkunegoro VI. Pada tanggal 11 Januari 1916 KGPAA Mangkunegara VI beserta keluarga meninggalkan tahta Mangkunegaran untuk menetap di Surabaya, kemudian wafat pada tanggal 24 Juni 1928. Pengganti KGPAA Mangkunegara VI adalah Raden Mas Ario Suryo Suparto (Raden Mas Suryo Suparto) putra KGPAA Mangkunegara V. R.M. Suparto beranggapan bahwa dengan pendidikan yang baik akan mampu menghadapi perjuangan hidup. Raden Mas Ario Suryo Suparto menghendaki masa depan yang lebih baik daripada suatu kehidupan santai dan tidak bermakna seperti yang sedang dijalani oleh para pangeran pada waktu itu. Namun hasrat tersebut kurang mendapat perhatian serius dari pamannya. Akhirnya R.M. Suparto memutuskan akan meninggalkan Mangkunegaran dan mencari pengalaman di luar. R.M. Ario Suryo Suparto magang pekerjaan di Kabupaten Demak, kemudian dalam waktu yang tidak lama diangkat menjadi Mantri (1905). Sambil bekerja sebagai mantri R.M. Ario Suryo Suparto sempat memperdalam pengetahuan, menekuni belajar bahasa Belanda dan sastra Jawa.

Pada suatu ketika terjadilah selisih paham dengan Bupati Demak, maka R.M. Ario Suryo Suparto mengundurkan diri dari pekerjaan Mantri. Sesudah itu R.M. Suparto merasakan penderitaan, beliau merasa tertekan dalam hidupnya. Dengan diiringkan oleh seorang pembantu, R.M. Ario Suryo Saputro Suparto menjelajahi pulau Jawa. Selama bepergian berjalan kaki, hanya kadang-kadang saja naik kereta api kelas 3. Pada malam hari R.M. Ario Suryo Suparto tidur di rumah kepala desa atau kepala kampung. Pengalaman perjalanan tersebut menimbulkan kepekaan terhadap lingkungan sosial, yang akan mempengaruhi pandangan hidup dan sikapnya dikemudian hari (Suwazi Bustomi, 1996 : 89-90).

Di desa-desa apabila Raden Mas Ario Suryo Suparto menyebutkan namanya, maka disambut oleh orang-orang desa yang miskin dan sederhana itu



dengan sangat hormatnya dan kepadanya diberikan makan dan penginapan, dan kemudian putera raja itu melanjutkan perjalanannya tanpa mengenal lelah, biasanya hanya dengan berjalan kaki, dan satu kali mendapat kenikmatan untuk naik kereta api di kelas 3. Sementara itu yang mempelajari bahasa Jawa, dan serta belajar membaca, menulis dan berbicara bahasa Belanda, untuk menghilangkan hausnya akan pengetahuan dan juga dahaganya akan pengalaman hidup. Ketika Residen Surakarta berjumpa pada suatu kesempatan, maka Residen tersebut kagum sekali akan pengetahuan bahasanya, akan banyaknya buku yang telah dibaca, dan akan minatnya yang besar terhadap kesusasteraan. Ketika ada lowongan pekerjaan penterjemah, maka Raden Mas Ario Suryo Suparto walaupun tidak pernah mendapatkan pendidikan akademis melamar pekerjaan itu dan iapun diterima. Dengan ini telah melakukan langkah peramanya di dalam karier, yang sangat disukai karena bakat dan minatnya.

Putera raja yang menjadi penterjemah itu menjadi pembantu yang giat dari gerakan ini. Walaupun ia masih muda dan belum banyak pengalaman hidupnya ia sudah berwibawa diantara kawan sealiran itu. Di sini sudah memperlihatkan sifat-sifatnya juga dikemudian hari bahwa meskipun fanatik sekali karena keyakinan, masih tetap "menep" (tenang) dan bijaksana dicampuri humor sedikit, untuk dapat tetap sadar dan obyektif. Di dalam harian Jawa "Darma Kanda" dalam bentuk kiasan telah mengutarakan pandangannya dan pendapatnya yang menolak chauvinisme (cinta air yang keterlaluan) dan menganjurkan untuk mendewasakan diri. Sebagai idealis yang realistis berpendapat bahwa memperdalam dan menjunjung tinggi kebudayaan merupakan tujuan dari semua usaha ke arah perbaikan bangsa dan dunia (H.G. Cannegieter, 1937 : 10-13).

RM Ario Suryo Suparto ketika menjadi penterjemah dikresidenan Surakarta Solo lebih banyak mengetahui dan mengikuti perkembangan yang terjadi pada bangsanya. Bangkit pula kesadarannya untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dikemudian hari, maka menggabungkan diri dalam perkumpulan yang ingin memperjuangkan kemerdekaan melalui pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Sebagai seorang yang gemar dan pandai menulis,

pendapat-pendapatnya mendukung dan mempropagandakan Budi Utomo di lingkungan masyarakat Solo dituangkannya dalam tulisan pada Koran *Darmo Kondo*, sehingga kemudian dikenal sebagai propaganda Pergerakan Bangsa yang patut dipuji. Sehingga Budi Utomo adalah organisasi pertama didalam kehidupan bangsa yang mempunyai kekuatan hukum dan dapat bergerak sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Berdasarkan hasil kongres yang dilaksanakan di Jogja pada bulan Oktober 1908, hasil kongres tersebut adalah:

- (1) Mengusahakan *Studiefods* (bea siswa) bagi anak-anak Bumi Putera yang tidak mampu dan ingin melanjutkan sekolahnya.
- (2) Melestarikan *tataksama* (adat-istiadat) Jawa yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.
- (3) Mengangkat bupati Karanganyar R. T. A. Tirtokusumo menjadi presiden Budi Utomo untuk periode 1908-1912 (Bernadinnah Hilmiyah, 1985:20-22).

Pada bulan Agustus 1915 Dr. Radjiman Wedyodiningrat meletakkan jabatan sebagai presiden Budi Utomo dan digantikan oleh R. M. A. Suryo Suparto yang ketika itu berumur 30 tahun. R. M. A. Suryo Suparto mulai terjun secara langsung selaku pucuk pimpinan di dalam pergerakan bangsa yang telah tumbuh selama 7 tahun. Pada bulan Oktober 1915 mengajukan kepada pemerintah tentang masalah pendidikan dimana dilihat dan dirasakannya bahwa harus ada perbaikan pengetahuan untuk para guru desa sehingga akan dapat mendidik murid-muridnya secara lebih baik. Hanya dengan meningkatkan mutu pendidikan guru-guru desalah maka akan diharapkan pondasi yang kukuh dan kuat dari anak-anak rakyat di pedesaan. Guru-guru hendaknya dipandang sebagai pemimpin dan pendidik rakyat. Berdasarkan pandangan yang demikianlah maka Budi Utomo yang dipimpin oleh R. M. Suryo Suparto mengajukan usul agar pemerintah sudi memperhatikan pendidikan terutama pendidikan guru sekolah desa harus diperbaiki dan diperbanyak untuk memperoleh tenaga-tenaga guru yang sanggup memberikan pendidikan rakyat yang layak (Bernadinnah Hilmiyah, 1985: 22- 23).

Suwazi Bastomi, R.M. Ario Suryo Suparto mempunyai harapan hidup lebih baik ketika diangkat oleh Residen Surakarta yakni G.F. van Wijk menjadi

penterjemah bahasa Jawa kedalam bahasa Belanda. Di samping tugasnya menjadi penterjemah R.M. Suryo Suparto aktif mengikuti perkumpulan Boedi Utomo cabang Surakarta, dan masih juga menjadi wartawan yang sangat bermutu pada harian berbahasa Jawa yang bernama Darma Kanda (Suwazi Bustomi, 1996 :90).

R.M. Ario Suryo Suparto mempunyai persamaan pandangan dengan Mr. Van Deventer terhadap kehidupan bernegara yang demokratis. Mereka juga mempunyai kesamaan pendapat tentang usaha memajukan dan mencerdaskan orang Jawa. Pandangan R.M. Suparto itu diutarakan dengan jelas ketika Mr. Van Deventer sedang berkunjung ke Surakarta. Mr. Van Deventer mengambil kesimpulan bahwa R.M. Ario Suryo Suparto adalah seorang pemuda yang cerdas, mampu memandang jauh ke depan dan mampu melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Oleh karena itu Mr. Van Deventer sangat simpati, sehingga R.M. Ario Suryo Suparto banyak mendapatkan bantuan dari Mr. Van Deventer.

Untuk memperluas wawasan tentang kenegaraan R.M. Ario Suryo Suparto mengadakan perjalanan ke Eropa dan kuliah di Universitas Leiden dengan maksud memperdalam tentang sastra kuna (1913). Maksud baik itu sangat didukung oleh Residen G.F. van Wijk, Mr. Abendanon, dan Mr. Van Deventer, walaupun untuk melaksanakannya, sepenuhnya dengan biaya sendiri. Di sela-sela belajar R.M. Ario Suryo Suparto memanfaatkan waktu untuk menulis buku "Kekesahan dhateng Negeri Welandi" yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. R.M. Ario Suryo Suparto mahir berbahasa Belanda sehingga beliau mudah bergaul dengan orang-orang intelek berpangkat tinggi di negeri Belanda. Bergaul dengan orang-orang kecil pun sangat akrab karena R.M. Ario Suryo Suparto memang orang pandai bergaul dengan siapa saja. Ketika pecah perang dunia pertama (1914) pemerintah negeri Belanda mengadakan mobilisasi militer. Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi diliburkan, R.M. Ario Suryo Suparto menjadi militer (Reserve Kader). Setelah satu tahun, R.M. Suparto naik pangkat menjadi Letnan II Resimen Grenadier.

Pada bulan Mei 1915 R.M. Ario Suryo Suparto pulang ke Surakarta. Sesampai di Surakarta R.M. Ario Suryo Suparto bekerja sebagai Ajang Kontrolir Tanah. Tidak lama kemudian R.M. Ario Suryo Suparto terpilih menjadi pengurus

Besar Boedi Utomo. Pada tanggal 3 Maret 1916 menggantikan kedudukan pamannya bergelar KGPAA Prabu Pragwadana (Suwazi Bustomi, 1996 :90-91).

R. M. Ario Suryo Suparto setelah menjadi *Prangwedono* VII (Mangkunegoro yang belum berusia 40 tahun) sesuai dengan tradisinya disebut Prangwedono atau pemimpin atau juga pemuka perang, dari sejarah berdirinya telah diangkat selaku anggota *Vooksraad* dan menurut catatan Djiwo Sewoyo yang dibuat pada tahun 1939 dalam rangka memperingati 24 tahun pengangkatan R. M. Ario Suryo Suparto selaku Mangkunegoro VII, bahwa selain memiliki *Vorstelanden* (daerah *Swarapaja* ) maka R. M. Ario Suryo Suparto adalah juga mewakili Budi Utomo (Bernadinnah Hilmiyah, 1985: 26). Kata *Vorstenlanden* artinya tanah-tanah Kerjaan. Yaitu ; *vorsten* = raja; *landen* = tanah. Dengan kata itu yang dimaksud dahulu pada zaman colonial adalah Kerajaan-kerajaan (*swarapaja*) yang terdapat di daerah Surakarta dan Yogyakarta (G.P Rouffaer, 1889 : 2).

Pada tanggal 3 Maret 1916 terjadi suatu peristiwa besar dalam perjalanan hidup putera raja yang masih muda ini. Pamannya, yaitu Pangeran Adipati Ario Mangkunagoro VI, turun tahta, karena kecewa dan sedih sekali, sebab puteranya dari perkawinannya yang kedua yang sangat dicintai tidak bisa menggantikannya sebagai raja, karena melanggar adat. Maka Raden Mas Ario Suryo Suparto menerima kehormatan dan diberi tanggung jawab untuk mengepalai Kadipaten Mangkunagaran dengan gelar Pangeran Adipati Ario Mangkunagoro VII. Peristiwa itu dirayakan dengan meriah. Ketika sang raja mulai memegang pemerintahan, usianya 21 tahun. Kesempatan yang baik itu akan digunakannya untuk melaksanakan cita-cita dari zaman mudanya. Kerajaannya di bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan telah berkembang menjadi yang paling penting diantara swapraja-swapraja lainnya.

Kepribadian yang besar dan kedudukannya yang tinggi digunakannya untuk memajukan olahraga, pengajaran, kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan seni dan budaya. Seorang pengamat yang ahli, yaitu HJM Nauta sarjana hukum dan Walikota Haren yang pada tahun 1928 memperoleh kesempatan dan kehormatan untuk berkunjung ke istananya di kota Solo, telah menulis dalam

harian "*Nieuwsblad van het Noorden*" beberapa sifat dan karakter dari Sri Mangkunagoro VII "Raja Mangkunegaran yang sekarang ini benar-benar berpemandangan maju. Telah mempelajari apa-apa yang baik dari kebudayaan Barat, namun ia tetap memiliki sifat orang Jawa"

Dalam hal ini yang dimaksud adalah bahwa memiliki sifat-sifat yang baik dari orang Jawa, dan dari bangsawan Jawa pada khususnya. Di dalam pribadinya telah bersatu yang termulia, baik dari bangsanya, maupun dari kasta bangsawan. Belum pernah kami menjumpai seseorang yang begitu agung penampilannya, yang begitu sopan, yang begitu halus tatakramanya, yang begitu halus pula perasaannya. Di dalam hidup telah bertemu dengan orang-orang yang bersikap menjauh untuk menunjukkan kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat. Akan tetapi Sri Mangkunegoro VII tidak menjauh, namun ada ruang. Tidak pernah "joviaal" (Jawa : *grapyak*= suka tertawa) tetapi juga tidak pernah "*minzaam*" (bersikap baik hati kepada orang yang dipandang rendah). Bukan yang ini dan bukan yang itu, namun yang ini dan juga yang itu. Mangkunegoro VII seorang seniman hidup yang ulung, sikapnya yang alai itu bergaya, dan gayanya itu alami. Beliau tinggi kedudukannya, tetapi tidak bertinggi hati/sombong. Orang yang berbobot, tetapi bukan orang yang pura-pura berbobot. Seorang yang suka kepada keindahan. Beliau memegang ukuran jangan sampai terjadi *over-cultur* (keterlaluhan dalam memegang teguh kebudayaan), sehingga penghalusan yang ditujunya menjadi bersifat "feminim" (bersifat wanita), pucat dan mentertawakan. Sebagai raja yang modern dan berusaha keras untuk menjunjung derajat bangsanya, dan memajukan kebudayaan Jawa, terutama seni tari, seni karawitan, seni sastra dan sejarah. Dengan usaha-usahanya itu maka istananya menjadi pusat baru bagi "kebudayaan Jawa" (H. G. Cannegieter, 1937:16-18)

R.M. Suparto setelah berusia 40 tahun dinobatkan menjadi KGPAA Mangkunegoro VII. Penobatan Mangkunegoro pada usia 40 tahun mengikuti batas usia Mohamad menjadi Rasul. Suatu hal yang menarik pada saat upacara penobatan adalah petikan pidato Residen Surakarta yang berbunyi "di Mangkunegaran ada persediaan harta benda cukup banyak yang dapat

dimanfaatkan untuk memajukan Praja Mangkunetaran beserta rakyatnya, menurut kehendak dan keyakinan Mangkunegara”. Jawab KGPAA Mangkunegara VII: ”Setelah berjalan satu tahun silam melihat hasilnya” (Suwazi Bustomi, 1996 : 82).

Mangkunegoro VII memiliki daerah kekuasaannya sendiri berada diwilayah Mangkunegaran yang berbeda dengan pemerintahan Keraton kasusuhunan Surakarta Hadiningrat ataupun dengan keraton Jogjakarta. Menurut H. G. Cannegieter seorang Belanda, bagi orang awam sukar untuk membedakan gelar para Raja di Hindia. Orang Belanda tidak tahu adakah ini nama ataukah gelar. Menurut tatakrama Hindia maka nama-nama pribadi yang tampaknya berulang kembali sebagai nama pribadi yang sebenarnya di dalam dinasti Barat, tidak lain adalah gelar-gelar kehormatan, yang sejak zaman kuno memiliki arti gaib. Di Netherland Sang Ratu dianggap memerintah atas kemurahan Tuhan (“*bij de gratie Gods*”). Tetapi di dunia Timur hal itu merupakan suatu keyakinan, bahwa Raja memang ditakdirkan untuk memerintah. Kalau kita ingin menerangkan arti Mangkunegoro, ternyata artinya adalah dia yang menjaga keselamatan rakyatnya. *Adipati* artinya panglima, *Ario* : yang mulia. *Mangku* atau *Hamangku* berarti meletakkan di atas pangkuan, dan secara kiasan artinya : menjaga keselamatan. Jadi Mangkunegoro berarti dia yang menjaga keselamatan negaranya. Kalau kita mendalami arti dan anggapan mistik yang dikaitkan oleh orang Timur pada kedudukan raja, maka dapatlah dimengerti bahwa dimasukkannya tradisi Jawa di bidang pemerintahan di lingkungan Gubernemen Belanda menimbulkan banyak problema yang rumit. Dari peradilan Indonesia yang masih bisa bertahan di daerah Swapraja sampai akhir abad ke 19, yang masih tersisa hanya “*pradoto-dalem*” yang berlaku bagi para keluarga raja.

Sistem pemerintahan asli juga banyak berubah karena adanya gubernemen Belanda. Angkatan perangnya dilebur ke dalam Tentara Hindia Belanda, dan raja-rajanya diberi gelar perwira tinggi dalam dinas luar biasa. Mangkunegoro adalah satu-satunya raja yang mengepalai sebuah legiun yang terlatih secara militer dan mempunyai senjata-senjaga modern. Kerajaannya kira-kira seluas kerajaan Luxembourg, dan berpenduduk kira-kira 1 juta orang. Oleh karena itu adalah suatu hal yang luar biasa bahwa seorang raja Hindia meninggalkan

kerajaannya dengan tujuan untuk menjadi wakil. Di sini terbukti betapa maju pandangan raja ini, sebab raja-raja yang lain hanya mengirimkan wakilnya ke Den Haag, yaitu puteranya, atau manantunya atau saudaranya, untuk menghadiri pesta perkawinan ini. Berbeda dengan mereka itu, Sri Mangkunegoro VII datang sendiri secara pribadi, dan mengikutsertakan permaisuri dan puterinya. Ini juga merupakan penyimpangan dari adat, yang melarang para puteri keluar dari tembok kraton (H.G. Cannegieter, 1937 : 6-7).

Pada tanggal 21 Februari 1917 KGPAA Mangkunegoro VII menyampaikan pidato yang tertuju kepada keluarga Mangkunegaran, para prajurit, nara Praja, dan orang-orang Belanda yang bertugas di Mangkunegaran. Bunyi pidato antara lain :

”Saiki wis ora cundhuk karo jamane yen kang juneneng Adipati iku mung merlokake nggone nengenake kawibawan bae sarta panggaweyan tumrap pangolahing Praja mung kapasrahake marang para nara Praja. Ing mangka yen benera ing jaman saiki kang jumeneng Adipati kudu dadi tuladha tumrap para putra santana, legium, nara Praja, lan para kawula ing atase kawekelaning pakaryan lan kautamaning budi. Aku kudu tansah manggalih lakuning Praja lan melu ngasta (tumindak) dhewe. Kang perlu dak galih dhisik iku panguripane para kawula cilik kang wiwit biyen tumeka saiki gawe sugihe Praja Mangkunegaran mangka salawase panguripane tansah rekasa, bumine kurang pametune amarga saka kekurangan banyu. Para nara karya uripe tanpa nganggo kabungahan, omahe mung emplek-emplek kang saru dinulu, ora oleh piwulung lan pamardi kang prayoga sarta ora ana kang nuntuni. Mula aku kudu ngudi marang kamulyane kawulaku wong cilik. Kowe kabeh kudu sayuk ambiyantu kalayan temen, padha anggedhekna kaantepanmu, supaya Praja Mangkunegaran bisa mundhak raharja sarta kawulaku wong cilik bisa kepenak uripe lan tentrem ayem atine, ora ngemungake kaya kang wus kelakon, nangin malah luwiha saka samono, sarta kowe kabeh kudu ambudidaya kalayan anderpati murih undhaking rasamu: bisa mentas

dhewe, bisa nganakake ada-ada tumrap paedahing akeh lan weruh ing wajib, sarta murih undhaking rasamu adil lan tentrem marang wong cilik”. (“Sekarang sudah tidak cocok dengan jamannya jika Adipati hanya mementingkan kewibawaan, serta pekerjaan mengelola Praja hanya diserahkan kepada para pegawai. Pada jaman sekarang yang benar, siapa yang menjadi Adipati harus menjadi teladan para kerabat, tentara para pegawai, dan seluruh rakyat dalam hal kesungguhan bekerja serta keluhuran budi. Aku harus selalu memikirkan kegiatan Praja Mangkunegaran serta ikut bertindak sendiri. Terlebih dahulu aku harus memikirkan kehidupan rakyat kecil yang sejak dahulu sampai sekarang membuat Mangkunegaran menjadi kaya, padahal selama hidupnya selalu sengsara, hasil bumi sangat kurang karena kekurangan air. Penghidupan para buruh sangat menyedihkan, rumahnya sangat jelek dan sangat tidak pantas, mereka tidak mendapatkan pendidikan dan pelayanan yang baik, yang membina pun tidak ada. Oleh karena itu aku harus mengusahakan kesejahteraan rakyat kecil. Engkau semua harus gotong royong membantu dengan sungguh-sungguh memperbesar semangat agar Mangkunegaran bertambah sejahtera serta kehidupan rakyat kecil dapat enak dan tenteram hatinya, tidak hanya puas dengan penghasilan yang telah diperoleh tetapi harus lebih daripada itu. Engkau semua harus berusaha sampai titik darah penghabisan agar perasaanmu meningkat dapat mandiri, mempunyai inisiatif untuk kepentingan orang banyak dan tahu kewajiban serta berusaha meningkatkan keadilan serta ketenteraman bagi rakyat (kecil)”)(Suwazi Bustomi, 1996 :92-94).

Pidato tersebut merupakan bentuk kepedulian Mangkunegoro VII bagi rakyatnya untuk memperhatikan mereka lebih baik lagi dan sebagai Adipati Mangkunegaran tidak seharusnya lagi memikirkan dirinya sendiri. Telah diketahui umum menurut Amien Singgih baik di Surakarta maupun di tanah Jawa bahwa perhatian Mangkunegoro VII terhadap rakyatnya besar sekali. Usaha dan pekerjaan memajukan pendidikan tidak putus-putus dilakukan oleh



Mangkunegoro VII baik pada waktu damai atau peperangan. Pekerjaan dalam lapangan pendidikan pada waktu silam dikerjakan oleh badan-badan partikelir dan lambat laun dijadikan pekerjaan resmi sehingga dikerjakan oleh cara-cara yang teratur, dan berhubungan erat dengan tata usaha kerajaan (Amien Singgih, 1944:1).

Pendidikan bagi rakyat adalah merupakan bidang yang diprioritaskan didalam kebijaksanaannya selaku kepala pemerintahan di Mangkunegoro. Dalam hal pendidikan, Mangkunegoro VII banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan baik non formal maupun formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diadakan di sekolah secara teratur, sistematis, dan mempunyai jenjang serta waktu yang telah ditetapkan sedangkan pendidikan non formal adalah suatu bentuk pendidikan yang diselenggarakan secara tertib, terarah, dan berencana di luar sekolah (Zahara Idris, 1981:12).

Bermodalkan pengalaman hidupnya sendiri, dengan disertai itikad baik untuk mengabdikan pada rakyatnya dan melanjutkan serta memelihara hal-hal yang telah dicapai oleh pendahulunya, disertai minat yang penuh untuk segala macam persoalan yang harus dihadapi, Mangkunegoro VII dengan tekun dan teliti mengikuti perkembangan tentang segala macam hal yang terjadi dan merasa terpanggil untuk selalu ingin berbuat sesuatu agar dapat meningkatkannya. Bahwa Jiwea Demokrat dan nasionalisme serta patriotisme masih tetap membara dalam dirinya walau telah dilanti menjadi seorang raja, Dapat dilihat dari pidato yang diucapkannya dihadapan Volsraad (Dewan Rakyat) pada tahun 1918, sebagai berikut “Walau terdapat perbedaan dalam pengetahuan dan kesejahteraan antara kaum bangsawan dengan rakyat banyak, namun pada hakekatnya kami merasa satu dengan rakyat. Karena itu adalah merupakan kewajiban dan sifat dari kami (kaum bangsawan) untuk ikut serta dalam pergerakan ini dan bila mungkin mendahuluinya”.

Pangeran Adipati Ario Mangkunagoro VII berjiwa kerakyatan, karena darah rakyat memang mengalir dari ibunya, dan Mangkunegoro VII telah mempelajari dan merasakan kehidupan rakyat jelata dalam masa pengembaraan sehingga dengan sepuhnya dapat menghayati rasanya jadi “*wong cilik*”

(Bernadinnah Hilmiyah, 1985: 41). Pangeran Adipati Ario Mangkunegoro VII adalah seorang raja yang berpemandangan maju. Riwayat hidup adalah bukti bahwa Pangeran Adipati Ario Mangkunegoro VII suka berdiri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain, suka memperluas pengetahuannya, dan berniat untuk memadu nilai-nilai budaya yang lama dengan kebudayaan modern sehingga keduanya berimbangan, dan membuat sintesa antara kebudayaan Timur dengan kebudayaan Barat, dan seakan-akan pengejawantahan dari sintesa tersebut.

Seperti halnya dengan setiap orang yang penting, maka pangeran dari Jawa ini baru dapat mencapai kedudukannya setelah melakukan perjuangan yang panjang dan sukar. Yaitu perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan dan kepribadian, dan dalam hal ini sekaligus merupakan perjuangan untuk emansipasi dari lingkungannya. Sebagai putera ketiga dari Sri Mangkunegoro V maka Raden Mas Ario Suryo Suparto dalam masa mudanya tidak ada kewajiban lain kecuali menjunjung tinggi tradisi lama, yang menjamin dapat hidup tenteram dan mewah. Akan tetapi Suparto begitulah nama kecilnya memiliki keinginan yang tidak bisa dibendung untuk belajar dan bekerja, dan batas-batas dari kadipaten Mangkunegaran terlalu sempit baginya, kalau teringat akan dunia luas yang ada di luarnya kepada kekayaan-kekayaan yang tidak ada batasnya yang terdapat di pulau Jawa dengan keanekaragaman budayanya, dan kepada negeri Belanda yang jauh itu yang berhubungan erat dengan tanah airnya. Keinginan akan emansipasi pada zaman itu telah menjadi keinginan banyak pemuda Jawa. Ungkapan dari keinginan itu di daerah swapraja tampak agar standard hidup rakyat dinaikkan. Di swapraja Paku-alam yang kecil itu keinginan raja turun-temurun, yaitu keinginan untuk memperbaiki keadaan rakyat di bidang ekonomi, pertanian dan kesehatan. Baik Sri Paku Alam V dan puteranya yaitu pangeran Ario Notodirodjo telah melakukan banyak upaya yang sifatnya sosial dan kemanusiaan. Dan putera pangeran ini yaitu Raden Mas Notosuroto yang sebagai sekretaris ikut dalam rombongan Sri Mangkunegoro VII, sebagai penulis dan pujangga juga telah mendobrak isolasi akibat tradisi lama dan telah berusaha menyelaraskan kebudayaan Hindia dengan peradaban modern dari dunia Barat. Setelah pamannya naik tahta sebagai Mangkunegoro VI dan melarangnya memasuki sekolah

menengah (Hogere Burger School/HBS), maka Raden Mas Ario Suryo Suparto sangat kecewa, dan kemudian mengambil keputusan sendiri untuk keluar dari perbatasan kerajaan Mangkunagaran, dan telah melanggar tradisi, dan akibatnya akan dirasakan. Kepergiannya itu berarti memutuskan dengan sengaja hubungan dengan masa lampau dan dengan lingkungannya. Hanya dengan diikuti oleh seorang abdi yang setia seperti dalam cerita 1001 malam, putera raja yang masih muda ini mengembara dari satu tempat ke tempat lain di pulau Jawa yang indah itu dan tiap hari memperoleh pengalaman-pengalaman baru yang mengejutkan. Pangeran dari Jawa yang masih muda itu setelah mengenal bangsanya dari segala tingkatan, baru menyadari bahwa hidup dari sebagian besar bangsanya tidaklah aman dan tenteram, apalagi jika dibandingkan dengan kehidupan di dalam istana yang serba nyaman itu, erkenalan dengan kesengsaraan, keburukan, kelaparan, kemiskinan, penyakit dan kematian (H.G. Cannegieter, 1937 : 7-9).

KGPAA Mangkunegoro VII sebagai pertanggungjawaban atas pidatonya pada tanggal 21 Februari 1917, sangat memajukan dunia pendidikan. Jumlah Sekolah Desa (Sekolah Dasar kelas rendah) ditambah, semula hanya 19 buah menjadi 127 buah, sedangkan Sekolah rakyat (Sekolah Dasar kelas atas) berjumlah 65 buah. Untuk memenuhi jumlah guru yang dibutuhkan, dibuka Kursus Guru Desa. Di samping itu juga membuka sekolah-sekolah putri Kopschool dan Sisworini (tanpa pelajaran bahasa Belanda), Sekolah Dasar dengan pelajaran Belanda (HIS) dan Sekolah Menengah Umum Pertama (MULO). Dalam perkembangannya, KGPAA Mangkunegoro VII menganggap bahwa sebuah HIS di Mangkunegaran tidak mampu menampung siswa yang begitu banyak jumlahnya, maka KGPAA Mangkunegara VII bermaksud membuka sebuah HIS lagi di Wonogiri. Pemerintah Belanda memahami pikiran KGPAA Mangkunegoro, maka pemerintah Belanda mendahului membukanya. Pada tahun 1917 dibuka perkumpulan Kepanduan (Pramuka) yang tujuannya mendidik anak dalam hal kehidupan bermasyarakat.

Perkumpulan Kepanduan itu cepat berkembang sampai ke desa-desa. Pada tahun 1937 terdapat 28 cabang perkumpulan Kepanduan dengan jumlah anggota 6000 orang. Pada tahun 1935 didirikan perkumpulan Krida Muda, yaitu

perkumpulan para pemuda seperti perkumpulan Kepanduan. Pada tahun 1941 terdapat 33 cabang Krida Muda dengan jumlah anggota 17.000 orang. Pada tahun 1942 perkumpulan Krida Muda dibubarkan oleh pemerintah Dai Nippon. Oleh karena perhatian KGPAA Mangkunegara VII terhadap olah raga sangat besar maka meminta izin kepada pemerintah Dai Nippon untuk mendirikan Barisan Pemuda dan pergerakan Olah Raga. Pemerintah Dai Nippon mengizinkan, maka pada tanggal 3 Oktober 1942 lahir perkumpulan Gerakan Taruna. Pada tanggal 29 April 1943 didirikan Jawa Kengo Seinendan, pemegang pimpinan adalah orang-orang Gerakan Taruna. Di samping usaha memajukan pendidikan tentang ilmu pengetahuan digalakkan pula pendidikan kesenian. Para putra Mangkunegaran dan para nara praja diwajibkan belajar menari dan krawitan. Telah disusun pedoman "joget" (tari) gaya Mangkunegaran. Tiap-tiap kelompok dan Kawedanan di wilayah Mangkunegaran diberi gamelan, dengan maksud untuk menyebarluaskan tari-tarian dan krawitan Mangkunegaran kepada seluruh rakyat Mangkunegaran. Sebagian besar sekolah dan organisasi masyarakat mendapat bantuan gamelan. Telah diadakan penelitian tentang cara mengajar "nembang" (menyanyi) yang efektif. Cara yang baik adalah nembang dengan notasi Sariswara ciptaan Ki Hajar Dewantara. Dengan Sariswara banyak dibuka kursus-kursus krawitan dan tembang. Di sekolah-sekolah pun diajarkan tembang dengan notasi Sariswara. Langendriyan lebih disempurnakan lagi. Telah disusun pedoman tari serta krawitan gaya Mangkunegaran, dan telah dibuka sekolah Pedalangan gaya Mangkunegaran. Selain itu diadakan pula Culturele Studiekring dan Javaansche Kunstkring Mardi Raras, kemudian pada tahun 1933 Javaansche Kunstkring Mardi Raras itu menjadi Siaran Radio Ketimuran yang berfungsi menyebarluaskan kesenian asli Jawa, terutama krawitan dan wayang orang yang dipergelarkan di Balekambang (Partinituin). Demikianlah usaha KGPAA Mangkunegoro VII dalam memajukan negara, meningkatkan derajat bangsa, meningkatkan taraf hidup rakyat kecil dengan memberi bimbingan, tuntunan, serta pelajaran kepada rakyatnya. Walaupun dalam pemerintahan KGPAA Mangkunegara VII dalam membangun negerinya cukup berhasil baik (Suwazi Bustomi, 1996 : 96-100).

Sekolah desa yang diselenggarakan adalah salah satu upaya untuk memberantas buta huruf. Sekolah desa (*vooschool*) ditempuh selama tiga tahun dan disetiap kelurahan didirikan. Setiap sekolah mempunyai dua guru yaitu sebagai kepala sekolah dan sebagai guru bantu. Biaya pada waktu itu atau sekarang yang disebut SPP dibayar setiap I bulan sebesar 1 sen. Biaya yang terjangkau bagi penduduk pribumi biasa Gaji masing-masing guru berbeda, jika kepala sekolah gajinya sebesar 27 golden sedangkan guru bantu sebesar 17 golden. Guru yang mengajar di sekolah desa umumnya lulusan dari Sekolah Angka Loro yang ditempuh selama 2 tahun. Guru yang mengajar di sekolah desa dari lulusan Angko Loro dilatih oleh guru dai CVO (*Volks Ondewijzer*) yaitu sekolah lanjutan dari sekolah Angko Loro selain itu juga ada yang lulusan dari HIK (*Hollands Indie Kweekschool*) (wawancara dengan K.R.T. Sumarso Ponco Sucitro, pada tanggal 29 September 2009).

Pemberantasan buta huruf dikerjakan menurut rencana yang telah ditentukan dalam sistem pendidikan menurut Mangkunegaran. Pada waktu itu diadakan panitia istimewa yang menyusun bagian keuangan, guru bantu yang diberi tugas untuk memimpin pemberantasan buta huruf. Pemberantasan buta huruf umumnya diikuti oleh rakyat biasa sedangkan bagian yang mengurus dan menguasai tatalaksana pemberantasan buta huruf tersebut dari kalangan *Pangreh Praja*. Karena kegiatan *Pangreh Pradja* dan panitia yang dibantu oleh kaum guru Mangkunegaran bertambah dengan pesat sehingga pada waktu itu terdapat sekitar 548 buah, muridnya yang lulus sekitar 2907 orang sehingga kursus untuk pemberantasan buta huruf bertambah lagi menjadi 665 buah dan yang lulus ada 4312 orang dan seterusnya kursus ini makin menunjukkan eksistensinya (Amien Singgih, 1944:2). Pemberantasan buta huruf dilakukan pada tahun 1934. Pada tahun 1943 jumlah penyelenggara PBH sebanyak 88 buah dengan jumlah lulusan 7940 orang, pada tahun 1944 meningkat menjadi 22.000 orang lulusan.

Perkumpulan Muhammadiyah diberi tanah untuk mendirikan sekolah, sedangkan Sekolah Menengah juga diberi tanah untuk membangun asrama pelajar. Anggaran belanja pendidikan diperbesar untuk membuka sekolah-sekolah baru dan memberi subsidi kepada sekolah swasta (Suwazi Bustomi, 1996 : 82).

Kemajuan pengajaran dan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan rakyat pada zamannya. Bila pada tahun 1918 hanya terdapat tiga buah sekolah desa maka pada tahun 1939 tercatat 103 buah *Volksschool* (sekolah rakyat) dengan jumlah murid sebanyak 13000 orang dan seluruh biaya ditanggung oleh Mangkunegaran karena keadaan desa rata-rata tidaklah kaya sehingga tidak dapat ikut memikul biaya yang diperlukan oleh sekolah. Selain itu hasrat untuk mencerdaskan rakyat melalui bacaan telah dipikirkan dengan mendirikan ruang baca dan perpustakaan untuk umum pada tahun 1920 bertempat didekat sositeit Mangkunegaran dengan harapan agar para pemuda memperluas pengetahuannya dan mengerti perkembangan dunia dengan cara membaca tulisan-tulisan dari buku, majalah dan koran. Perpustakaan lain khusus untuk rakyat didirikan pada tahun 1926 dengan menyisihkan dana keuntungan pabrik gula Colomadu. Mengingat bahwa penguasaan bahasa asing adalah penting untuk berkomunikasi dan menambah pengetahuan maka telah diperintahkan pada tahun 1924 untuk mulai mengajar semua pembantu penulis keatas dan perwira- perwira legiun agar mengikuti kursus bahasa Belanda dan tambahan pengetahuan umum.

Pada waktu di Solo diadakan cabang *Lederlandse Leergaang* (kursus bahasa Belanda) R. M. Ario Suryo Suparto membantu pelaksanaan sepenuhnya dan memberikan tempat serta menjadi ketuanya. Untuk pihak lain yang ingin mendirikan sekolah diberikan tanah dengan cuma-cuma sehingga daerah Mangkunegaran penuh dengan sekolah seperti AMS dengan asramanya, *Chiristelijike Mulo I DAN II de HIS* Gubernemen, *Neutrale HIS*, *Neutrale Europe school*, *Konign Wilhelmina school* (HIS untuk anak perempuan, *Chiristeleleijk Huis Huidschool*, *Huidoud school Aisiah*, *Van Deventer shool*. Mengingat bahwa Budi Utomo terutama adalah untuk mencari honor untuk dapatnya memberikan *Studifonds* (bea siswa) pada anak-anak yang pandai tetapi orang tuanya tidak mapu, maka R.M. Suryo Suparto secara pribadi memberikan *studifonds* kepada banyak orang dan melanjutkan mengembangkan *Studifonds* yang telah dirintis Mangkunegaran VI pada tahun 1912 sehingga pada tahun 1937 tercatat jumlah penerima *studifonds* Mangkunegaran sebanyak 538 orang dengan uraian 14 orang untuk tingkat universitas di Nederland, 39 untuk tingkat universitas di Jawa dan

sisanya untuk tingkat sekolah menengah di Jawa. Sekolah tersebut Mangkunegoro VII juga mendirikan sekolah tehnik untuk bidang kayu dan besi yang didirikan pada pabrik-pabrik gula Tasikmadu dan Colomadu untuk dapatnya mempersiapkan tenaga tehnik yang cukup sesuai kebutuhan rakyat, tercatat jumlah murid sampai pada tahun 1937 sejumlah 150 orang pada sekolah yang didirikan sejak 1929 (Bernadinnah Hilmiyah, 1985:43-44).

Mangkunegoro VII mendahulukan program pendidikan rakyat dan mengatasi kesulitan yang dialami di daerah yang minim misalnya Wonogiri serta ketertiban administrasi dan pengumpulan data merupakan masalah yang diutamakan dalam menunjang organisasi praja Mangkunegaran. Pemikiran untuk mencerdaskan bangsanya, sesuai dan sebagai kelanjutan dari yang telah dicita-citakan R. A Kartini adalah dikeluarkannya peraturan mengenai pendidikan. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk menegaskan bahwa kepada anak perempuan hendaknya diberikan hak yang sama untuk dapat menikmati pendidikan di sekolah (Bernadinnah Hilmiyah, 1985:43). Sebagai wujud kepedulian Mangkunegoro VII terhadap wanita Jawa, maka beliau menyelenggarakan pendidikan bagi wanita Jawa dengan cara memberi kesempatan seluas-luasnya bagi wanita Jawa untuk mengikuti pendidikan formal dengan bersekolah.

### **C. Sekolah Sisworini Sebagai Bentuk Kepedulian Mangkunegoro VII terhadap Wanita Jawa**

Wanita Jawa adalah anggota masyarakat yang mendukung kebudayaan Jawa. Mengenai kebudayaan, Haryati Sudibyo menyatakan bahwa kebudayaan merupakan sistem nilai dan gagasan utama. Sistem nilai dan gagasan utama sebagai hakekat kebudayaan terwujud dalam sistem budaya secara lebih terperinci lagi yaitu sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi ( Haryati Sudibyo, 1985: 20).

Wanita Jawa umumnya masih mempunyai sifat-sifat sebagai mana digambarkan mengenai kelompoknya yaitu nrimo, pasrah, halus, sabar, setia, bakti, dan sifat-sifat lain seperti cerdas, kritis, berani menyatakan pendiriannya (Saparinah, 1982 : 155). Sifat-sifat tersebut merupakan kepribadian wanita Jawa

dan gambaran ideal dari wanita Jawa. Kepribadian wanita itu dibentuk dalam lingkungan keluarga yang telah dipengaruhi oleh sistem nilai budaya. Kepribadian wanita Jawa akan tercermin dalam sistem sosialnya, yang bersifat konform atau berusaha menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan yang berlaku supaya dapat memenuhi harapan lingkungannya, meskipun tindakan-tindakan tersebut diperoleh dalam proses sosialisasi dan enkulturasi (Budi Santoso, 1992 : 57).

Peranan wanita Jawa, masyarakat Jawa pada umumnya masih menilai tinggi bahwa wanita setelah menikah sebaiknya tinggal dirumah, mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak karena hal tersebut sudah merupakan kodrat bagi anak wanita yaitu menikah, melahirkan dan merawat anak-anak mereka (Budi Santoso, 1992: 57). Sehingga sebagian masyarakat Jawa menganggap bahwa pendidikan bukan merupakan prioritas utama bagi wanita bahkan tidak perlu sama sekali. Wanita cukup menjadi ibu rumah tangga saja dan menjadi *konco wingknig*. Melihat kondisi sosial wanita Jawa pada masa itu, Mangkunegoro VII tergerak hatinya untuk ikut mencerdaskan kehidupan rakyatnya terutama bagi wanita Jawa yang masih sulit untuk mengenyam pendidikan dan masalah adat-istiadat itu salah satu faktor penghambat majunya wanita Jawa.

Sekolah Sisworini yang sebelumnya telah didirikan pada tahun 1912 oleh Mangkunegoro VI adalah sekolah untuk anak wanita, pada tahun 1923 ditingkatkan menjadi *huishoudkursus* Sisworini (kursus kerumahtanggaan) dengan maksud mempersiapkan anak wanita menjadi “Ibu” dan pemegang rumah tangga yang baik dan kemudian ditingkatkan lagi menjadi *Huishodschool* (Sekolah Kepandaian Puteri) (Bernadinnah Hilmiyah, 1985:43). Namun pada masa pemerintahan Mangkunegoro VII pada tahun 1916 Sisworini mulai mengalami kemajuan (wawancara dengan K.R..T. Sumarso Ponco Sucitro, pada tanggal 29 September 2009). Sekolah Putri bernama Sisworini, sekolah itu tanpa pelajaran bahasa Belanda, namun dibuka kursus-kursus bahasa Belanda yang diselenggarakan pada sore hari. Untuk menambah wawasan dan meningkatkan kualitas para nara Praja, beberapa orang nara Praja diberi kesempatan tugas belajar ke negeri lain (Suwazi Bustomi, 1996 : 82).



Pendirian Sekolah Sisworini didasarkan atas pertimbangan akan pentingnya kedudukan serta tanggung jawab wanita dalam rumah tangga. Wanita diharapkan menjadi teman sekerja laki-laki dalam keluarga, yang mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh serta mendidik anak-anak hingga tumbuh menjadi anak-anak yang bertanggung jawab pada diri sendiri, orang tua, bangsa dan negara, terlebih kepada Tuhan. Lebih dari itu, wanita dalam rumah tangga dituntut untuk menjadi terang yang dapat menampakkan cahayanya bagi seluruh keluarga. Segala kemampuan ini tidak akan terpenuhi tanpa adanya bekal pendidikan yang cukup bagi kaum wanita. Untuk tujuan inilah maka pemerintahan Mangkunegaran mendirikan Sisworini. Di sekolah ini para wanita dipersiapkan untuk memasuki kehidupan rumah tangga dengan segala tanggung jawabnya, dengan diberi bekal ilmu pengetahuan yang cukup mengenai kerumahtanggaan dan pengetahuan berbagai macam ketrampilan.

Sistem pendidikan sekolah Sisworini mengarah pada anak wanita di lingkungan Mangkunegaran dan sekitarnya. Bukan saja dari kalangan anak-anak *priyayi*, anak-anak *wedono* atau untuk anak-anak *penewu* melainkan juga dari kalangan abdi dalem dan rakyat biasa atau *wong cilik*. Selain itu terdapat pembatasan atas dasar kesehatan, sekolah tidak menerima murid-murid yang cacat, menderita penyakit menular dan murid yang belum mendapatkan suntik atau cacar. Sekolah Sisworini setingkat dengan sekolah menengah pertama yang ditempuh selama tiga tahun. Letak sekolah Sisworini berada di sebelah timur pendopo Agung yang dinamakan *dalem Prangwedono* atau didepan pintu gerbang timur istana Mangkunegaran. Guru berasal dari kerabat Mangkunegaran sendiri. Secara administrasi Sisworini secara resmi dibiayai oleh Mangkunegaran sendiri dengan uang kas kerajaan dan gaji guru sendiri secara resmi dibayar sesuai dengan jabatan masing-masing. Gaji paling banyak diterima oleh guru sebesar 50-80 golden dan yang paling sedikit sebesar 30 golden. Sisworini dipimpin oleh kepala sekolah dan menurut narasumber pada tahun 1939 Nyonya Sutarso menjadi kepala sekolah, adalah istri dari penewu Wonogiri yang bekerja untuk Mangkunegaran.

Uang sekolah atau *schoolgeld* dibayarkan setiap bulan. Walaupun pendidikan yang ditempuh tiga tahun dan dibagi menjadi tiga tahap selama setahun namun murid hanya menyelesaikan pendidikan selama sepuluh bulan setiap pertahap. Kurikulum disekolah Sisworini hamper sama dengan sekolah umum lainnya. Yang dipelajari antara lain : ilmu bumi, ilmu berhitung, pendidikan bahasa Jawa, ilmu sosial, dan ada pelajaran bahasa Belanda tapi tidak sebagai pengantar. Karena sekolah Sisworini merupakan sekolah wanita tentu saja ada hal yang membedakannya dengan sekolah umum yang lainnya yaitu terdapat kursus-kursus wanita. Ini yang diartikan bahwa Sisworini bertujuan untuk mendidik gadis Jawa bukan saja pintar namun juga terampil. Kursus-kursus itu antara lain : menjahit, memasak, menari, karawitan, membatik (wawancara dengan K.R..T. Sumarso Ponco Sucitro, pada tanggal 29 September 2009).

Sekolah ini ditangani secara langsung oleh suatu komisi yang dibentuk oleh pemerintah praja Mangkunegaran yang tugasnya mengadakan pemeriksaan terhadap perkembangan sekolah ini pada tiap tahun. Namanya adalah "*Baroto Wiyoto*" yaitu kabupaten yang khusus membawahi dan mengurus instansi pendidikan di wilayah Mangkunegaran. Proses belajar mengajar pada sekolah Sisworini dilaksanakan mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 12.30 dengan dua kali istirahat selama 15 menit. Pada hari Jum"at, Minggu, dan hari raya agama Islam, sekolah diliburkan, disamping itu juga ada liburan menghadapi bulan puasa, tiap tahun sekali bersamaan dengan kenaikan kelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa sekolah hanya masuk lima kali dalam satu minggu. Sekolah ini terdiri dari 7 kelas, dan yang menentukan kelas-kelas ini adalah kepala sekolah. Sedangkan pengangkatan dan penetapan kepala sekolah dan guru bantu ditetapkan oleh kepala Mangkunegaran atas persetujuan Residen Surakarta. Bagi anak-anak yang berhasil diterima di sekolah ini, untuk yang baru mulai sekolah dimasukkan tingkat pertama. Tiap tahun sekali, kepala sekolah akan menentukan murid-murid yang berhasil naik kelas dan juga menentukan berhasil atau tidaknya siswa menyelesaikan piendidikannya disekolah Sisworini. Bagi anak-anak yang telah berhasil atau lulus diberi sertifikat yang ditandatangani oleh ketu komisi,

sekretaris dan kepala sekolah (wawancara dengan K.R..T. Sumarso Ponco Sucitro, pada tanggal 30 September 2009).

Dalam berbagai kesempatan Mangkunegoro VII sering melibatkan murid-murid Sisworini dalam acara-acara tertentu. Seperti yang ditulis pada Babad Mangkunegoro VII :

”Pada tanggal 23 Agustus 1919 kebetulan sekali hari Minggu di Alun-alun Yogyakarta diselenggarakan perayaan pasar malam selama lima hari, hasil-hasil dari adanya pasar malam itu akan disumbangkan kepada penderita bencana gunung Kelud. Pada kesempatan itu Sri Paduka Mangkunagara juga berkenan mengirim barang-barang songketan dan lukisan hasil kerajinan para murid sekolah Sisworini Mangkunagaran. Hasil dari penjualan barang-barang itu yang 20% nya akan diserahkan kepada panitia pasar malam, juga dengan maksud untuk memberikan sumbangan kepada penderita bencana alam Gunung Kelud. Setibanya di Yogyakarta, Kepala SD Sisworini yang diutus mengantar barang tersebut langsung singgah di rumah Dr. RM. Kadiran (Panitia Pasar Malam) dan setelah barang itu diterimanya terus ditempatkan di Stand Pasar Malam Setelah pasar malam itu berakhir dan diselenggarakan perhitungan hasil penjualan barang-barang itu, dari nilai jual seharga empat ratus rupiah lebih, hanya mendapat uang sebanyak dua ratus ribu rupiah lebih sedikit. Karena di dalam pasar malam itu juga banyak sekolah-sekolah yang lain berjualan di situ. Ada yang berjualan makanan bermacam-macam, bahkan ada yang mendirikan restoran, semuanya dilayani sendiri oleh murid-murid di sekolah masing-masing. Murid-murid yang melayani di stand-stand itu ada yang sudah dewasa-dewasa, terpaksa harus diawasi oleh gurunya langsung. Melayani para pembelinya dengan ramah tamah baik sekali, karena murid-murid itu juga kebetulan menguasai bahasa Belanda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga dengan luwesnya. Pada Stand Restoran tampak laku sekali padahal hanya dilayani lima orang pelajar wanita, sehingga tampak sibuk sekali. Tiada terhitung banyaknya para pengunjung pasar malam tersebut, sengaja memerlukan melihat kegiatan dan kemeriahan pasar malam. Karena banyaknya pendatang

tampak berduyun-duyun memenuhi pasar malam, ada lagi yang berdesakan berebut depan karena agar lebih jelas dapat menyaksikan tiap stand, tiap atraksi atau pertunjukan yang lainnya. Setelah jam 18.00 para pengunjung pasar malam semakin berkurang, ada yang terus kembali pulang. Namun demikian antara jam 19.00 terpaksa ada yang kembali melihat lagi sampai larut malam. Hampir setiap hari selama pasar malam berlangsung para pengunjung tiada hentinya berdatangan untuk melihatnya. Pada tanggal 29 Agustus 1919 jam 07.30 Legiun Mangkunagaran juga menyelenggarakan perayaan di Pamedan Mangkunagaran. Tempat duduk Sri Paduka disediakan di Trisana, antara tempat duduk para pegawai dan isteri-isteri Legiun hanya dibatasi dengan bambu, dihiasi dengan bermacam-macam lukisan dan tulisan agar menambah semaraknya perayaan itu. Tidak ketinggalan murid-murid Sisworini ikut juga merayakan adanya perayaan tersebut, ada yang lomba olah raga, ada yang lomba seni, ada yang berlomba cerdas tangkas dan lain-lain” (Suraya, 1993: 166).

Pekembangan sekolah Sisworini yang begitu pesat diharapkan lulusan sekolah ini mampu menembus lapangan pekerjaan pada kepegawaian pemerintah. Wanita tidak harus menjadi *konco wingking* saja yang selalu mengurus anak dan suami atau bekerja diladang atau sawah hingga matahari terbenam serta bekerja pada keluarga Eropa menjadi pembantu melainkan dapat bekerja di perkantoran daerah. Jabatan bagi wanita yang bekerja di kantor kepegawaian antara lain: *Nyi Renggo, Nyi Demang, Nyi Mantri, Nyi Bei, Nyi Menggung*. Istilah tersebut dipakai pada jabatan wanita sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga wanita Jawa dapat berkiprah disegala bidang dengan tetap mempertahankan nilai Jawa. Selain itu tetap pada tujuan utama diharapkan membentuk wanita Jawa sesuai dengan cita-cita Mangkunegaran yaitu wanita Jawa diharapkan memiliki jiwa keprajuritan, yang dimaksud dengan jiwa keprajuritan adalah wanita Jawa yang mumpuni dalam rumah tangga, mampu mengatur ekonomi dengan baik serta pintar dan terampil, selain itu juga mampu membina hubungan kekerabatan Mangkunegaran dengan pergaulan yang luwes. Dengan cita-cita wanita Jawa

maka didirikan organisasi wanita di lingkungan Mangkunegaran sebagai wadah untuk menampung aspirasi serta inspirasi wanita Jawa kedepan yang lebih baik lagi sehingga mampu bersaing dengan wanita-wanita lain di dunia. Organisasi itu adalah HPMN singkatan dari Himpunan Perempuan Mangkunegaran (wawancara dengan K.R..T. Sumarso Ponco Sucitro, pada tanggal 29 September 2009).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peranan Sekolah Sisworini Bagi Peningkatan Pendidikan Wanita Jawa, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mangkunegoro VII mengusahakan kemajuan dalam bidang pendidikan di wilayahnya, baik itu pendidikan formal yang berupa pendirian sekolah-sekolah. Diantaranya sekolah-sekolah desa dan sekolah Siswo Mangkunegaran. Selain itu juga mengusahakan sekolah bagi kaum wanita, yaitu sekolah Sisworini. Selain pendidikan formal, Mangkunegoro VII juga menyelenggarakan pendidikan non formal yaitu melalui organisasi-organisasi pemuda dan usaha pemberantasan buta huruf. Bahkan dalam memajukan pendidikan tersebut, Mangkunegoro VII juga mengusahakan pemberian bea siswa.
2. Sekolah Sisworini didirikan pada tahun 1912 oleh Mangkunegoro VI adalah sekolah untuk anak wanita. Pada tahun 1923 ditingkatkan menjadi *huishoudkursus* Sisworini (kursus kerumahtanggaan) dengan maksud mempersiapkan anak wanita menjadi “Ibu” dan pemegang rumah tangga yang baik, kemudian ditingkatkan lagi menjadi *Huishodschool* (Sekolah Kepandaian Puteri). Pada masa pemerintahan Mangkunegoro VII pada tahun 1916 Sisworini mulai mengalami kemajuan. Sekolah Putri bernama Sisworini, sekolah itu tanpa pelajaran Bahasa Belanda, namun dibuka kursus-kursus Bahasa Belanda yang diselenggarakan pada sore hari.

Sekolah ini ditangani secara langsung oleh suatu komisi yang dibentuk oleh pemerintah praja Mangkunegaran yang tugasnya mengadakan pemeriksaan terhadap perkembangan sekolah pada tiap tahun. Namanya adalah “*Baroto Wiyoto*” yaitu kabupaten yang khusus membawahi dan mengurus instansi pendidikan di wilayah Mangkunegaran. Disekolah ini para wanita dipersiapkan untuk memasuki kehidupan rumah tangga dengan segala tanggung jawabnya, dengan diberi bekal ilmu pengetahuan yang cukup mengenai kerumahtanggaan dan pengetahuan berbagai macam ketrampilan.

## **B. Implikasi**

### **1. Implikasi Teoritis**

Pada masa pemerintahan Mangkunegaran VII, istana Mangkunegaran banyak mengalami kemajuan, baik dibidang politik, sosial ekonomi, maupun sosial budaya. Kemajuan yang diperoleh pemerintah Mangkunegaran tidak terlepas dari peranan Mangkunegoro VII sebagai pemegang tahta Kadipaten Mangkunegaran. Kedudukannya sebagai pemegang tahta kadipaten Mangkunegaran menempatkannya sebagai seorang yang mempunyai kekuasaan tertinggi di istana Mangkunegaran. Untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya ditempuh melalui jalur pendidikan. Pendidikan bagi rakyatnya adalah merupakan bidang yang diprioritaskan di dalam kebijaksanaannya selaku kepala pemerintahan di Mangkunegaran.

### **2. Implikasi Praktis**

Dengan adanya sekolah Sisworini, maka pusat pendidikan serta pelestarian budaya keraton bukan lagi berada di keraton melainkan di sekolah yang merupakan bagian institusi pelestarian budaya Jawa.. Antusias para orang tua untuk menyekolahkan anaknya sangat besar, disamping itu kesadaran para orang tua untuk mengikutsertakan anak wanitanya untuk bersekolah sedikit demi sedikit merubah cara pandang masyarakat tentang peranan wanita yang sebelumnya wanita hanya memiliki peranan di rumah saja , bekerja disawah atau diperkebunan

tetapi dengan adanya sekolah siswori ini yang memiliki tujuan untuk mencerdaskan wanita Jawa tapi juga tidak meninggalkan tugas dan peranannya sebagai seorang istri kelak.

### **C. Saran**

#### **1. Kepada Mahasiswa**

Mahasiswa hendaknya turut menjaga dan memelihara keaslian peninggalan- peninggalan Pura Mangkunegaran, baik bentuk fisiknya maupun tradisi- tradisi yang ada. Pura Mangkunegaran salah satu pusat kebudayaan di Surakarta merupakan warisan ajaran- ajaran dan nilai- nilai budaya Jawa yang perlu diketahui bahwa banyak ajaran pendidikan nilai- nilai luhur Jawa tentang kehidupan yang banyak manfaatnya. Sebagai warga masyarakat yang berpendidikan dan berbudaya, mahasiswa diharapkan ikut melestarikan budaya Timur.

#### **2. Kepada Wanita Jawa**

Wanita Jawa sekarang ini hendaknya tetap menjaga tradisi- tradisi leluhur dalam bersikap. Sebagaimana diketahui wanita Jawa memiliki citra yang wanita alus dalam bertutur kata, sabar, dan sebelum melakukan tindakan selalu berfikir lebih dahulu serta ikut melestarikan budaya- budaya Jawa misalnya saja mempelajari tarian- tarian Jawa, menggunakan batik dalam berbagai kesempatan dan tetap selalu mencerminkan kepribadian wanita Jawa namun juga selalu up to date tentang perkembangan pengetahuan dan berpikir modern sehingga tidak dikatakan bahwa wanita Jawa itu kuno dan ketinggalan zaman.

